

L. Rincian Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan



**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERHUBUNGAN**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
DAFTAR GAMBAR	III
DAFTAR TABEL.....	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	8
2. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan.....	8
2. 2. Sumber Daya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo	17
2. 3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan.....	22
2. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan.....	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	31
3. 1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan.....	31
3. 2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	36
3. 3. Telaah Renstra Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, dan Renstra Dinas Perakim dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.....	38
3. 4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	43
3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	47
4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	47
4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	47
4.3. Program Unggulan.....	47
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
5.1. Strategi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan.....	50
5.2. Arah Kebijakan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan.....	51
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	53

6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	53
BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS PERKIMHUB YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	90
BAB VIII PENUTUP	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan.....	2
Gambar 2. Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	3
Gambar 3. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOSOBO	10

DAFTAR TABEL

Table 1. Keadaan Personil Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo (September 2021).....	17
Table 2. Daftar Terminal Kabupaten Wonosobo.....	18
Table 3. Perencanaan, Pengelolaan dan Pengembangan Terminal, Halte dan Dermaga.....	19
Table 4. Rekapitulasi Aset DISPERKIMHUB Kabupaten Wonosobo Tahun 2020	20
Table 5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo.....	24
Table 6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo	27
Table 7. Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran	32
Table 8. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo.....	49
Table 9. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	52
Table 10. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo.....	60
Table 11. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan merupakan salah satu Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam pasal 272 mewajibkan perangkat daerah menyusun suatu dokumen perencanaan daerah jangka menengah bersifat strategis yang disebut dengan Rencana Strategis (RENSTRA) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Dijelaskan pula dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (2), yang berbunyi: "Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah".

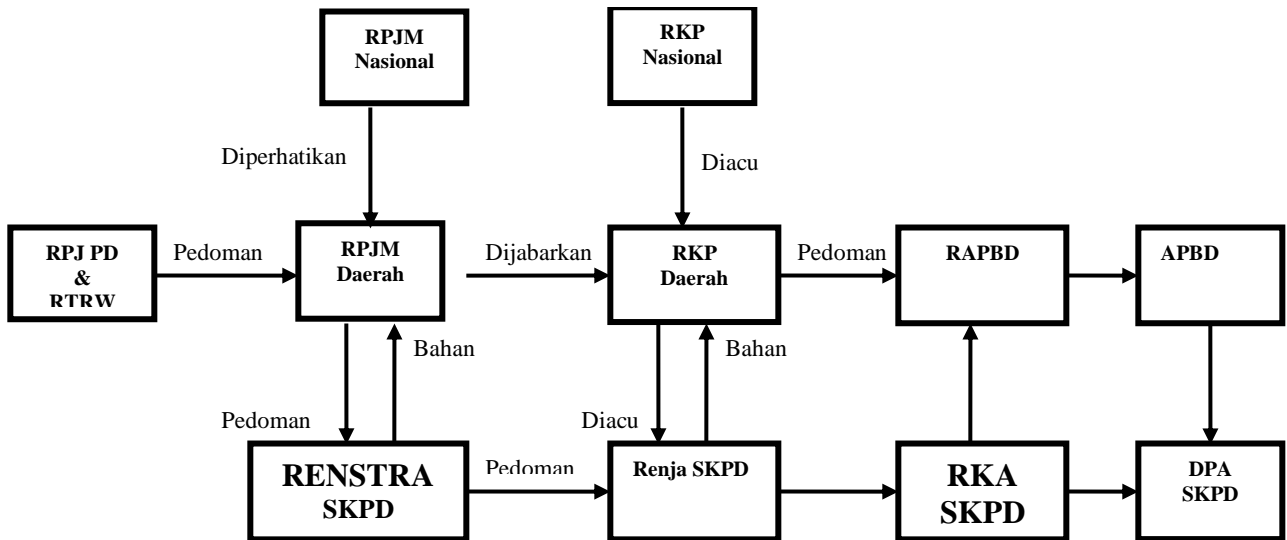
Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan mengacu pada RPJMD Kabupaten Wonosobo. Dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan masuk dalam Misi Bupati ke-Empat ("Mewujudkan pembangunan Infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata"), dari Visi Bupati-Wakil Bupati Wonosobo yaitu "Terwujudnya Wonosobo Bersatu Untuk Maju, Mandiri Dan Sejahtera Untuk Semua" serta tujuan dan sasaran, menguraikan rincian daftar program dan kegiatan, serta menyediakan tolok ukur penilaian kinerja, yang semuanya dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Proses Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan ini berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Kabupaten Wonosobo Tahun 2021–2026, pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan /informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu

strategis, perumusan visi-misi-tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan diskusi mendalam antar bidang pembangunan, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati serta penetapan oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan untuk dapat dilaksanakan.

Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan



RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

RPJPD Kabupaten Wonosobo saat ini memasuki Kebijakan Pembangunan tahap ke-4 (2021-2025). Posisi RPJMD Kabupaten Wonosobo 2021-2026 selanjutnya menjadi dokumen yang menjabarkan perencanaan jangka panjang secara lebih terfokus.

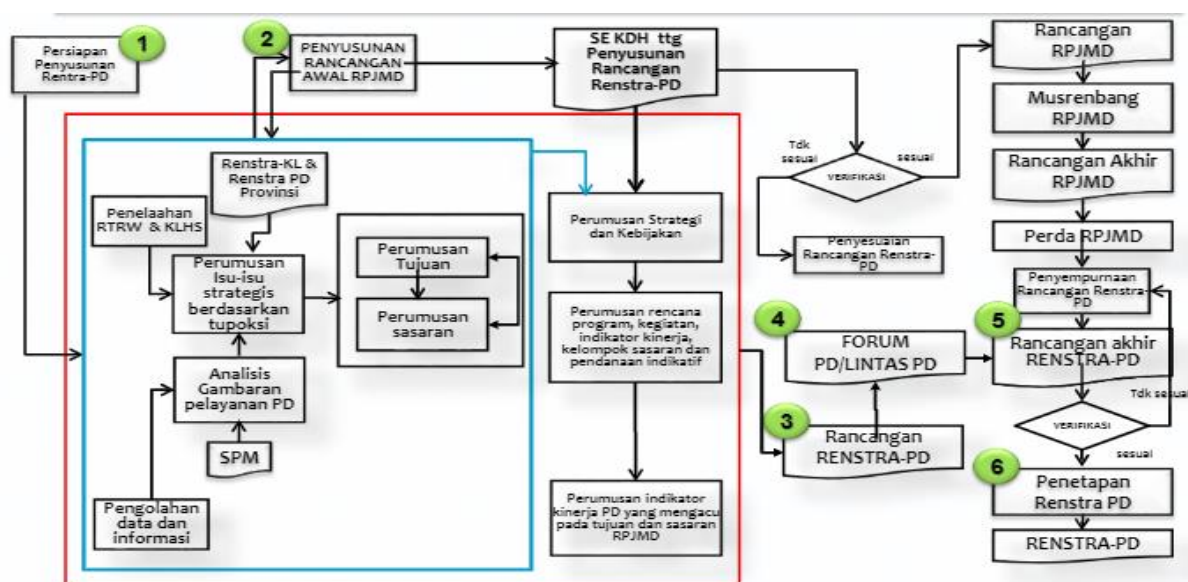
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan setiap tahun mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Rencana Kerja SKPD menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah.

Critical pointnya adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome*.

Keterkaitan Restra PD dengan dan tahapannya berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017, tahap tersebut adalah persiapan penyusunan Renstra PD, penyusunan rancangan awal Renstra PD, rancangan awal Renstra PD, pelaksanaan forum PD/Lintas PD, rancangan akhir Renstra PD, dan terakhir adalah penetapan Renstra PD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Gambar 2. Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo disusun berdasarkan:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak- Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, Dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo tahun 2011 - 2031;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 28. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;
32. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
33. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Kabupaten Wonosobo.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud :

- 1) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
- 2) Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun ke depan;
- 3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
- 4) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- 5) Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

1.3.2. Tujuan :

- 1) Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi Kepala Daerah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;
- 2) Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan bagi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, dan Renstra Dinas Perakim dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
- 4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
- 4.3 Program Unggulan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo
- 5.2 Arah Kebijakan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

- 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

2. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Kabupaten Wonosoboadalah sebagai berikut:

2.1.1. Tugas Pokok

Membantu Bupati dalam Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perumahan Kawasan Permukiman, Bidang Perhubungan dan Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;

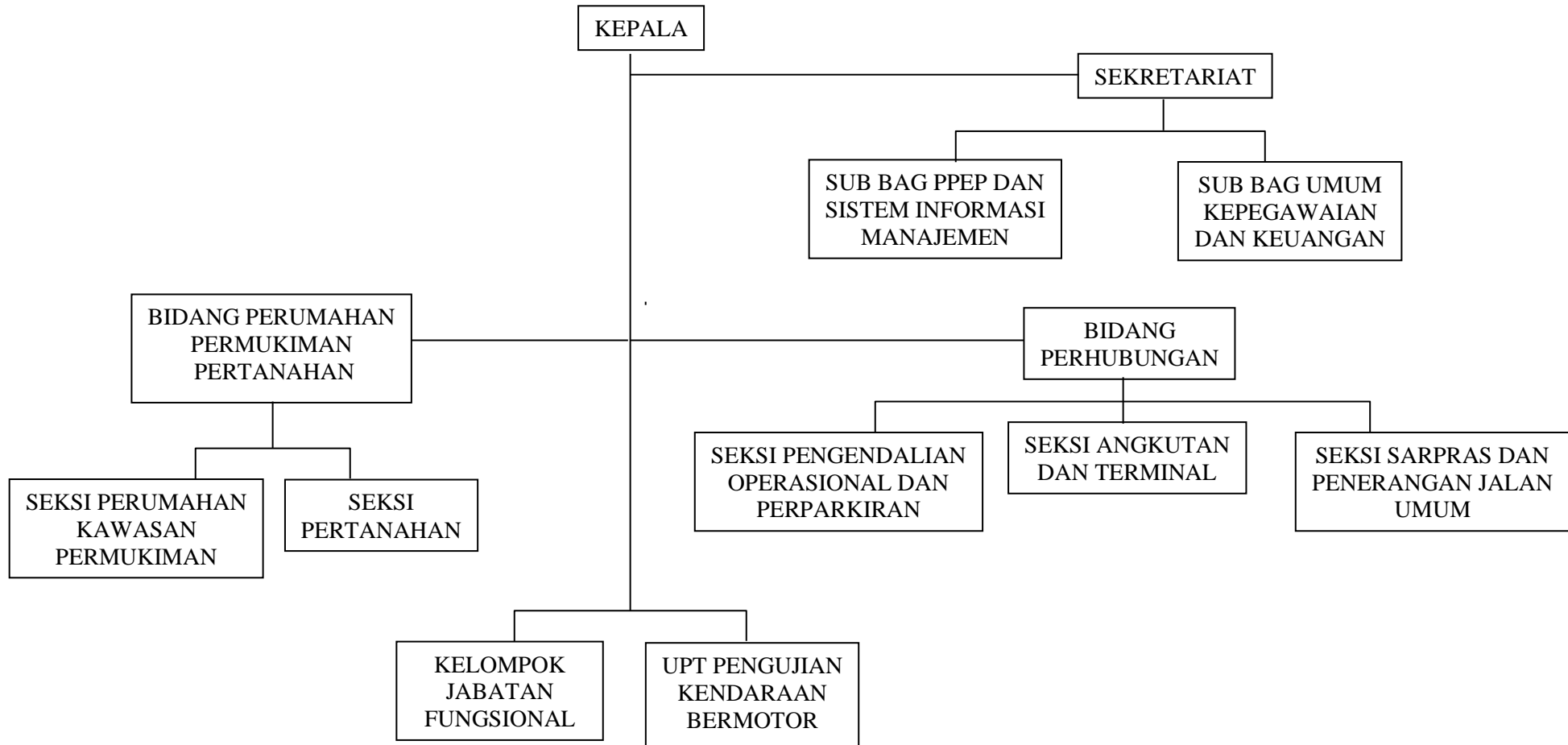
2.1.2. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perumahan kawasan pemukiman, bidang pertanahan dan bidang perhubungan serta kesekretariatan;
2. Pelaksanaan koordinasi di bidang perumahan kawasan pemukiman, bidang pertanahan dan bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan, pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengendalian terhadap pelaksanaan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan, dan pengembangan kawasan
4. Pelaksanaan pelayanan umum dan fasilitas bagi penyelenggaraan perhubungan di daerah meliputi rekayasa lalu lintas dan pengendalian operasional, angkutan dan sarana prasarana perhubungan serta pengelolaan perpajakan;
5. Pelaksanaan pengembangan strategi dan program untuk kelancaran lalu lintas/perhubungan, ketertiban, keselamatan, dan penanggulangan kecelakaan;
6. Pelaksanaan penyusunan rekomendasi teknis bagi penerbitan dan pencabutan ijin di bidang perhubungan, serta pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaannya;
7. Pelaksanaan layanan pengujian kendaraan bermotor;
8. Evaluasi dan pelaporan bidang perumahan kawasan pemukiman, bidang pertanahan dan bidang perhubungan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
10. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis dinas;
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Kabupaten Wonosobo adalah sebagaimana gambar dibawah ini:

Gambar 3.
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN WONOSOBO



2.1.4.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a) Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintah Perumahan Kawasan Permukiman, bidang Perhubungan, dan Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pertanahan, dan bidang Perhubungan, serta kesekretariatan;
- b) Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang perumahan kawasan permukiman, bidang perhubungan dan bidang pertanahan;
- c) Pelaksanaan pengaturan, pembinaan perkotaan, perumahan perdesaan dan pengembangan kawasan;
- d) Pelaksaaan pelayanan umum dan fasilitasi bagi penyelenggaraan perhubungan di daerah meliputi rekayasa lalu lintas dan pengendalian operasional, angkutan dan sarana prasarana perhubungan, serta pengelolaan perparkiran;
- e) Pelaksanaan pengembangan strategi dan program kelancaran lalu lintas/ perhubungan, ketertiban, keselamatan, dan penanggulangan kecelakaan;
- f) Pelaksaaan penyusunan rekomendasi teknis bagi penerbitan dan pencabutan izin di bidang perhubungan, serta pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaannya;
- g) Pelaksanaan layanan pengujian kendaraan bermotor;
- h) Evaluasi dan pelaporan bidang perumahan kawasan permukiman, bidang perhubungan dan bidang pertanahan;
- i) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- j) Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan kepegawaian, keuangan, aset,tata usaha, umum dan kerumahatanganan, kehumasan, pembinaan hukum dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan kepada masyarakat;

Sekretaris mempunyai fungsi:

- a) Menyiapkan perumusan kebijakan operasional tugas administarsi di lingkungan Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Perhubungan;
- b) Pengkoordinasian pelaksanaa tugas dan pemberian dukung data, informasi dan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Perhubungan;

- c) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Perhubungan;
- d) Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan taat laksana di lingkungan Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Perhubungan;
- e) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Perhubungan;
- f) Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g) Penyelenggaraan Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Perhubungan;
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya;

Sekretariat terdiri dari:

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Keuangan;
 - b) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan SIM;
- Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas:
 - 1. Menyiapkan dan pengkoordinasian pengelola keuangan, kepegawaian, tata usaha, kerumahtanggaan, kehumasan, penatalaksanaan hukum dan dukungan administrasi umum yang menjaditanggung jawab Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Perhubungan;;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Infarmasi Manajemen mempunyai tugas:
 - 1. Penyiapan dan pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan tugas dan pengelolaan sistem informasi manajemen yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Perhubungan;
3. Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas:
- a) Perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
- Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi:
- a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;

- c) Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengendalian serta kemitraan terhadap perumahan perkotaan , perumahan perdesaaan dan pengembangan kawasan;
- d) Penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan pengajuan perizinan pembangunan perumahan di perkotaan dan perdesaan;
- e) Penyusunan bahan kebijakan, rancangan petunjuk teknis, dan pengelolaan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- f) Penyiapan bahan kebijakan, rancangan petunjuk teknis, dan rencana kegiatan dalam pengelolaan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota;
- g) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;

Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari:

- a) Seksi Perumahan Kawasan Permukiman;
- b) Seksi Pertanahan;

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

- a. Seksi Perumahan Kawasan Permukiman mempunyai tugas:
 - 1. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan kawasan permukiman;
 - b. Seksi Pertanahan mempunyai tugas:
 - 1. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanahan;
4. Bidang Perhubungan mempunyai tugas:
- a) Merumuskan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan di bidang pengendalian operasional dan perparkiran, angkutan dan terminal, sarana prasarana, dan penerangan jalan umum;

Bidang Perhubungan mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan Perumusan kebijakan operasional di bidang pengendalian operasional dan perparkiran, angkutan dan terminal, sarana prasarana dan penerangan jalan umum;
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengendalian operasional dan perparkiran, angkutan dan terminal, sarana prasarana dan penerangan jalan umum;
- c) Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional, perparkiran, angkutan dan terminal;
- d) Melaksanakan perawatan sarana dan prasarana lalu lintas secara rutin dan berkala;
- e) Melaksanakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;

- f) Menyelenggaraan pelayanan rekomendasi perizinan trayek dan atau operasi pengangkutan orang/barang khusus di jalan dan danau;
- g) Pengajuan ijin pemasangan penerangan jalan umum berdasar rencana Induk Penerangan Jalan Umum serta kebijakan prioritas pemberian rekomendasi pada batas minimal jaringan antar tingkat dusun pertimbangan keseimbangan dari jumlah retribusi yang masuk;
- h) Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasional dan perpajakan, angkutan dan terminal, sarana prasarana dan penerangan jalan umum;

Bidang Perhubungan terdiri dari:

- a) Seksi Pengendalian Operasional dan Perpajakan;
- b) Seksi Angkutan dan Terminal;
- c) Seksi Sarana Prasarana dan Penerangan Jalan Umum

Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang Perhubungan.

a. Seksi Pengendalian Operasional dan Perpajakan mempunyai tugas:

Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasional dan perpajakan;

b. Seksi Angkutan dan Terminal mempunyai tugas:

Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Angkutan dan Terminal;

c. Seksi Sarana Prasarana dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas:

Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis supervisi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana Prasarana dan Penerangan Jalan Umum.

5. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas:

Melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan ;

6. Kelompok Jabatan

a) Eselon jabatan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas adalah Jabatan struktural eselon II b atau Jabatan pimpinan tinggi pertama;
- Sekretaris adalah jabatan struktural eselon III a atau jabatan administrator;
- Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III b atau jabatan administrator;
- Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IV a atau jabatan pengawas;

- b) Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo memiliki pegawai sejumlah 63 orang terdiri dari 45 orang berstatus PNS, 18 orang tenaga honorer sedangkan dalam menjalankan tugasnya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) sebanyak 66 (Enam Puluh Enam) antara lain:

A. SOP Sekretariat :

1. Pelayanan Administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar
2. Pelayanan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS
3. Pelayanan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala PNS
4. Pengajuan Usul Masa Persiapan Pensiun (MPP)
5. Pengajuan Pensiun
6. Pembuatan Karis / Karsu
7. Pengelolaan Masalah Kebersihan
8. Mekanisme Ijin Keluar
9. Pembuatan Surat Tugas Kedinasan
10. Penanganan Atas Tindakan Indisiplin Pegawai
11. Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
12. Pengajuan Cuti Tahunan Pejabat Struktural Eselon III
13. Pengajuan Cuti Tahunan untuk Staf, Fungsional, Pejabat Struktural Eselon IV
14. Pengajuan Cuti Sakit lebih dari 2 s/d 14 hari untuk Pejabat Struktural Eselon III
15. Pengajuan Cuti Sakit lebih dari 2 s/d 14 hari untuk Staf, Fungsional, Pejabat Struktural Eselon IV
16. Penyusunan Laporan Absensi Pegawai Secara Berkala ke BKD
17. Pelaksanaan Kegiatan rapat Koordinasi Internal Dinas
18. Pelaksanaan Kegiatan rapat Koordinasi Lintas Dinas
19. Penyusunan Daftar Urutan Kepegawaian (DUK) tiap semester
20. Pengajuan Ijin Belajar
21. Pengusulan Pengurusan Taspen
22. Pengusulan Pengurusan Askes
23. Pengelolaan Barang
24. Pengiriman Surat
25. Penerimaan Tamu
26. Penerimaan Telepon
27. Penerimaan Berita melalui Email
28. Penyusunan Inventaris Barang
29. Penyusunan Inventaris Ruangan
30. Pengajuan Gaji Baru dan Tunjangan Bagi CPNS (Pegawai Baru)
31. Penyusunan Daftar Gaji dan Pendistribusian (PNS dan CPNS)

32. Penyusunan Daftar Gaji dan Pendistribusian (Pegawai Honorer)
 33. Pengajuan Penambahan Tunjangan Anak
 34. Pengajuan Pencairan Kegiatan Ganti Uang
 35. Administrasi Keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 36. Pencairan Anggaran LS Kegiatan
 37. Penyusunan SK Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala
 38. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan oleh Bendahara Pengeluaran ke DPPKA (SIMDA)
 39. Pemberian Surat perintah Perjalanan Dinas(SPPD)
 40. Pengajuan SPM
 41. Penyusunan SPJ
 42. Penyusunan Perubahan daftar gaji
 43. Penyusunan Pengawasan Mata Anggaran
 44. Penyusunan Laporan Bulanan Rencana Pelaksanaan Kegiatan
 45. Penyusunan Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan Fisik dan Non Fisik
 46. Penyusunan Renstra Dispermukimhub
 47. Penyusunan Renja Dispermukimhub
 48. Penyusunan RKA
 49. Penyusunan DPA
 50. Penyusunan LAKIP
 51. Penyusunan Penetapan
 52. Penyusunan Indikator Kinerja Utama Kinerja
 53. Penyusunan Laporan Bulanan
 54. Penyusunan Laporan Semesteran
 55. Penyusunan Laporan Tahunan
 56. Penyusunan Monitoring dan Evaluasi
 57. Perencanaan Kinerja
 58. Pengukuran Kinerja
 59. Pelaporan Kinerja
 60. Evaluasi Kinerja
 61. Pencapaian Kinerja
 62. Pemantauan Kinerja
- B. SOP Bidang Angkutan
1. Pelayanan Perpanjangan Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang
 2. Pelayanan Perpanjangan Ijin Trayek Angkutan Perkotaan dan Perdesaan
- C. SOP Bidang Terminal dan Perparkiran
1. Prosedur Permohonan Menjadi Petugas Parkir
- D. SOP UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
1. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor untuk pemastian kelaikan jalan kendaraan bermotor dan pemenuhan PAD Kabupaten Wonosobo dari sektor Pengujian Kendaraan Bermotor
 2. Pelayanan Rekomendasi Numpang Uji Kendaraan Bermotor
 3. Pelayanan Rekomendasi Mutasi Uji Kendaraan Bermotor

2. 2. Sumber Daya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo

2.2.1. Sumber Daya Manusia Disperkimhub

Sebagai salah satu kekuatan pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo memiliki pegawai sejumlah 68 orang terdiri dari 45 orang berstatus PNS, tenaga honorer sebanyak 23 orang. Bentuk kekuatan dimaksud dapat dilihat dari rincian berdasarkan beberapa dimensi/kekuatan sebagai berikut:

Jumlah Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari tingkat pendidikan adalah:

a.	Berpendidikan S2 berjumlah	6	Orang
b.	Berpendidikan S1 berjumlah	10	orang
c.	Berpendidikan D3 berjumlah	3	orang
d.	Berpendidikan D2 berjumlah	2	orang
e.	Berpendidikan SLTA berjumlah	19	orang
f.	Berpendidikan SLTP berjumlah	1	orang
g.	Berpendidikan SD berjumlah	4	orang

Sumber daya manusia yang berstatus PNS ditinjau dari Golongan adalah sebagai berikut:

a.	Golongan IV berjumlah	4	orang
b.	Golongan III berjumlah	15	orang
c.	Golongan II berjumlah	19	orang
d.	Golongan I berjumlah	5	orang

Adapun komposisi pegawai dengan strata pendidikan, tergambar sebagai berikut:

Table 1.

Keadaan Personil Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo (September 2021)

N O	GOL RUANG	ESELON					Staf	STRATA PENDIDIKAN (Orang)					
		II b	III a	III b	IVa	IVb		SD	SMP	SMA	D3/ SM	S1	S2
1	IV	2	2									1	3
2	III				8	1	8			2	3	10	2
3	II						19			19			
4	I						5	5					

Sumber : Bagian Kepegawaian DISPERKIMHUB September 2021 (data diolah)

Sedangkan berdasarkan jumlah eselon pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan adalah sebagai berikut:

a.	Eselon II.b	2	Jabatan
b.	Eselon III.a	2	Jabatan
c.	Eselon III.b	-	Jabatan
d.	Eselon IV.a	8	Jabatan
e.	Eselon IV.b	1	Jabatan

2.2.2. Aset dan Unit Usaha yang Masih Operasional

Sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

1. Kantor Dinas bertempat di Jl. Soepardjo Rustam Kel Andongsili Kabupaten Wonosobo.
2. Unit Pengujian Kendaraan Bermotor
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan mengoperasikan 1 (satu) lokasi pelayanan pengujian kendaraan yaitu di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan melayani 15 kecamatan.
3. Terminal
Terminal adalah sebuah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Kabupaten Wonosobo memiliki 2 (dua) terminal yang terbagi dalam beberapa type dan fasilitas yang dimiliki sebagaimana tersebut dibawah ini:

Table 2.
Daftar Terminal Kabupaten Wonosobo

No.	Nama Terminal	Lokasi	Type	Titik Koordinat
1.	Terminal Mendolo	Kel. Bumireso, Kec. Wonosobo	A	-7.367520, 109.924608
2.	Terminal Mendolo	Kel. Bumireso, Kec. Wonosobo	C	-7.367520, 109.924608
3.	Terminal Sawangan	Kel. Sawangan, Kec. Leksono	C	-7.3850206, 109.8368601
4.	Terminal Keselamatan Jalan Reco	Desa Reco, Kec. Kertek	-	-7.3454882, 110.0255572
5.	Terminal Stasiun (Meliputi : Pasar Induk / TPR Bhayangkara / Jalan Resimen	Kel. Wonosobo Barat, Kec. Wonosobo	C	-
6.	Terminal Kaliwiro	Kel. Kaliwiro, Kec. Kaliwiro	C	-7.467129, 109.847257

No.	Nama Terminal	Lokasi	Type	Titik Koordinat
7.	Terminal Wadaslintang	Kel. Wadaslintang, Kec. Wadaslintang	C	-7.551273, 109.810750
8.	Terminal Leksono	Kel. Leksono, Kec. Leksono	C	-7.419096, 109.856434
9.	Terminal Gondang	Kel. Gondang, Kec. Watumalang	C	-7.353478, 109.886357
10.	Terminal Kalibeber	Kel. Kalibeber, Kec. Mojotengah	C	-7.325745, 109.903166
11.	Terminal Garung	Desa Siwuran, Kec. Garung	C	-7.293326, 109.923968
12.	Terminal Dieng Wetan	Desa Dieng Wetan, Kec. Kejajar	C	-7.204896, 109.912979
13.	Terminal Kertek	Kel. Kertek, Kec. Kertek	C	-7.389106, 109.964918
14.	Terminal Kembaran	Desa Kembaran, Kec. Kalikajar	C	-7.393678, 109.987589
15.	Terminal Sapuran	Kel. Sapuran, Kec. Sapuran	C	-7.472869, 109.980637
16.	Terminal Balekambang	Desa Balekambang, Kec. Selomerto	C	-7.432498, 109.908827

Sumber : SK Terminal 2019 - 2020

Sedangkan terminal, halte dan dermaga dalam proses perencanaan, pengelolaan dan pengembangan yang dimulai Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Table 3.
Perencanaan, Pengelolaan dan Pengembangan Terminal, Halte dan Dermaga

NO.	NAMA TERMINAL, HALTE, DERMAGA	LOKASI	TYPE
1.	Candiyasan	Jl. Parakan Kabelukan	C
2.	Candimulyo I	Jl. Parakan Candiroto	C
3.	Candimulyo II	Jl. Parakan Gondang	C
4.	Wadaslintang	Jl. Prembun	C
5.	Dermaga I	Paras Wadaslintang	C
6.	Dermaga II	Kumejing Wadaslintang	C
7.	Dermaga III	Tritis Wadaslintang	C
8.	Terminal Angkutan Barang Mendolo	Jl. Bambang Sugeng	C
9.	Terminal Terpadu Andongsili	Jl. Soepardjo Roestam	C

Sumber : Bagian Perencanaan DISPERKIMHUB (data diolah)

Pada 24 Agustus 2021, DISPERKIMHUB mendapatkan hibah Dermaga Tritis dan Kumejing Wadaslintang dari Kementerian

Perhubungan sehingga pengelolaan dan pengembangan dermaga tersebut sudah menjadi wewenang dari DISPERKIMHUB Kabupaten Wonosobo.

Table 4.
Rekapitulasi Aset DISPERKIMHUB Kabupaten Wonosobo
Tahun 2020

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang	
			Baik	Rusak
1.	Tanah plus Gedung Kantor	2 unit 10.901 m ²	Baik	
2.	Kendaraan Dinas roda 4 (empat)	10 Unit	Baik	
3.	Kendaraan Dinas roda 2	22 unit	21 Baik	1 Rusak
4.	Micro Bus	1 unit	Baik	
5.	Truk Crane	1 unit	Baik	
6.	Mesin Gerindra	2 unit	Baik	
7.	Mesin Las Listrik	1 unit	Baik	
8.	Perkakas Bengkel Listrik	2 unit	Baik	
9.	Mesin Gergaji	1 unit	Baik	
10.	Mesin Bor Kayu	1 unit	Baik	
11.	Tool Kit Set	16 unit	Baik	
12.	Alat Uji Kendaraan	9 unit	Baik	
13.	Mesin ketik manual	2 unit	Baik	
14.	Almari besi	12 unit	Baik	
15.	Peti uang /Brankas	1 unit	Baik	
16.	Almari kayu	6 unit	Baik	
17.	Meja rapat	12 unit	Baik	
18.	Meja Resepsionis	2 unit	Baik	
19.	Meja Kerja	26 unit	Baik	
20.	Meja Tamu	1 unit	Baik	
21.	Kursi Tamu	1 unit	Baik	
22.	Kursi Kayu	20 unit	Baik	
23.	Kursi Putar	3 unit	Baik	
24.	Kursi lipat	120 unit	Baik	
25.	Bangku Tunggu	25 unit	Baik	

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang	
			Baik	Rusak
26.	Sofa	1 unit	Baik	
27.	Meja komputer	5 unit	Baik	
28.	Mesin Pemotong Rumput	1 unit	Baik	
29.	Mesin Penghisap Debu	1 unit	Baik	
30.	Kipas angin	1 unit	Baik	
31.	Televisi	4 unit	Baik	
32.	Tape Recorder	1 unit	Baik	
33.	Loudspeaker	1 unit	Baik	
34.	Wireless	2 unit	Baik	
35.	Megaphone	1 unit	Baik	
36.	Camera Video	8 unit	Baik	
37.	Dispenser	2 unit	Baik	
38.	Alat Pemadam	2 unit	Baik	
39.	Unit power suply	4 unit	Baik	
40.	Proyektor	2 unit	Baik	
41.	Komputer PC	24 unit	Baik	
42.	Lap top	16 unit	Baik	
43.	Note Book	4 unit	Baik	
44.	Tablet PC	2 unit	Baik	
45.	Printer	16 unit	Baik	
46.	Scanner	1 unit	Baik	
47.	Server	1 unit	Baik	
48.	Router	1 unit	Baik	
49.	Acces Point	1 unit	Baik	
50.	Tenda	3 unit	Baik	
51.	Almari arsip	1 unit	Baik	
52.	Peralatan studio	2 unit	Baik	
53.	Faximilie	1 unit	Baik	
54.	CCTV	1 unit	Baik	
55.	Handy Talky	10 unit	Baik	

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang	
			Baik	Rusak
56.	Telephone	3 unit	Baik	
57.	Guadrail	29 paket	Baik	
58.	Electronic Warning System (EWS)	6 unit	Baik	
59.	Lampu Trafik Light	10 unit	Baik	
60.	Lampu Flassing	6 unit	Baik	
61.	Lampu Flassing Solar Celll	4 unit	Baik	
62.	Warning Light	6 unit	Baik	
63.	Warning Light Solar Cell	10 unit	Baik	
64.	Alat Kontrol Trafik Light	2 unit	Baik	
65.	Rambu – Rambu Lalu Lintas	369 unit	Baik	
66.	Alat Penerangan Jalan Solat Cell	16 unit	Baik	
67.	Lampu TL Flaser, Count Down	19 unit	Baik	
68.	Rambu Elektronik (Running Text)	6 unit	Baik	
69.	Cermin Tikungan	20 unit	Baik	
70.	Deliniator	78 unit	Baik	

Sumber : Bagian Aset DISPERKIMHUB (data diolah)

Untuk proses menertibkan administrasi pengelolaan barang dan jasa di DISPERKIMHUB, seluruh barang inventaris telah di inventarisir dan tercatat dalam Buku Inventaris Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. Jika dilihat dari jumlah aset, dapat diketahui bahwa jumlah aset yang dikuasai DISPERKIMHUB Kabupaten Wonosobo sebanyak Rp. 34.492.283,17,-,

2. 3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan dibentuk melalui Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan di wilayah Kabupaten Wonosobo, utamanya dalam pelayanan transportasi. Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Perumahan Kawasan Permukiman Perhubungan dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam Rencana 5 (Lima) Tahunan telah disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo selama 5 (lima) tahun terakhir (2016 - 2021) dapat dilihat pada Tabel 5:

Table 5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Kabupaten Wonosobo

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman																		
	Rasio rumah layak huni		32%		0.890	0.894	0.899	0.904	0.909	0.750	0.761	0.776	0.292	0.30	84.29%	85.12%	86.32%	32.26%	32%
	Rasio permukiman layak huni		37%		2	2.12	2.12	2	2	DTD	0.67	0.67	0.78	0.79	0.00%	31.82%	31.82%	36.61%	37%
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni		9%		2	4	6	8	10	DTD	0.855	0.8671	0.922	0.936	0.00%	21.38%	14.45%	11.52%	9%
	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau		63%		4%	5%	6%	7.5%	9%	3.81%	3.96%	5.37%	DTD	6%	95.25%	79.20%	89.50%	0.00%	63%
	Persentase permukiman yang tertata		0%		78%	80%	82.50%	85%	87.5%	DTD	DTD	DTD	29	DTD	0.00%	0.00%	DTD	34.12%	DTD
	Persentase lingkungan permukiman kumuh		100%		0.07	0.07	0.070	0.016	0.011	DTD	0.002	0.054	0.005	0.011	0.00%	2.63%	77.35%	28.75%	100%
	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan		100%		7.5%	8%	8.5%	9%	10%	DTD	12.71	77.04	0.06	0.16	0.00%	100%	100%	66.67%	100%
	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan		78%		DTD	0	0	0	0	DTD	15.39%	14.12%	12.72%	15.56%	DTD	76.95%	70.61%	63.60%	78%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU		100%		DTD	57%	57%	57%	57%	DTD	57%	57%	57%	57%	DTD	100%	100%	100%	100%
2.	Urusan Pertanahan																		
	Persentase luas lahan bersertifikat		0		47.86	52.17	56.86	62	68	DTD	DTD	DTD	27%	DTD	0.00%	0.00%	0.00%	0.44%	0
	Penyelesaian kasus tanah Negara		DTD		100%	100%	100%	100%	DTD	DTD	100%	100%	100%	DTD	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	DTD
3.	Urusan Perhubungan																		
	Jumlah arus penumpang angkutan umum		51%		1200000	1130000	990000	930000	900000	1121362	987888	923547	881296	455234	93.45%	87.42%	93.29%	94.76%	51%
	Rasio ijin trayek		0%		0.20	0.35	0.50	0.60	0.7	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004	0.25%	0.14%	0.10%	0.08%	0.06%
	Jumlah uji kir angkutan umum		72%		18600	18600	18600	18600	15500	13556	13812	14887	14962	11,098	72.88%	74.26%	80.04%	80.44%	72%
	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		100%		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
	Persentase layanan angkutan darat		14%		87.50%	90%	93%	95%	97.50%	0.06%	0.07%	0.07%	0.07%	0.14	0.07%	0.07%	0.08%	0.07%	14%
	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum		100%		35%	37%	37%	35%	58%	35%	37%	37%	35%	58%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
	Pemasangan Rambu - rambu		100%		73%	79%	84%	89%	95%	73%	79%	84%	89%	95%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan		100%		0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum		51%		120000 0	11300 00	99000 0	930000	90000 0	112136 2	987888	923547	881296	455234	93.45%	87.42%	93.29%	94.76%	51%

Sumber : LKPJ DISPERKIMHUB 2020 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa capaian indikator untuk tiap urusan sudah cukup baik namun pada Urusan Perhubungan masih terdapat gap antara target dengan realisasi pada capaian rasio izin trayek salah satu faktornya yaitu rendahnya minat penumpang untuk menggunakan moda angkutan umum yang menyebabkan menurunnya pendapatan operator angkutan umum sehingga tidak bisa memperpanjang izin trayek ataupun membuat izin trayek baru serta meningkatnya pertumbuhan kendaraan pribadi. Pada tahun 2020 banyak kegiatan yang mengalami *refocusing* sehingga tidak dapat memenuhi target capaian kinerja.

Table 6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Kabupaten Wonosobo

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Anggaran dan Realisasi Tahun ke-					Rata- Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	160.110.000	190.050.000	100,000,000	100,000,000	200.000.000	146.564.133	186.067.786	99,415,000	94,737,000	Refocusing	91,54%	97,90	99.42%	95%	Refocusing	9.972.500	(-36.641.183)
Program Pengembangan Perumahan	-	1.080.000.000	1,441,000,000	1,617,144,000	10,009,020,560	-	935.594.750	1,318,750,350	2,357,298,586	9,137,053,350	-	86,63	91.52%	66%	91%	2.502.255.140	2.284.263.337
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	-	-	150,000,000	-	-	-	-	141,079,600	-	-	-	-	94%	-	-	0	0
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	155.000.000	1.000.000.000	2,725,000,000	850.000.000	100.000.000	58.042.635	677.843.800	57,454,800	279,477,200	Refocusing	37,44%	67,78%	76,61%	33%	Refocusing	(-13.750.000)	(-14.510.659)
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	225.000.000	50.000.000	75,000,000	50,000,000	50.000.000	224.241.000	46.700.000	9,710,000	14,183,200	Refocusing	99,66%	93,40%	12.95%	15%	Refocusing	(-43.750.000)	(-56.060.250)
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	-	150.000.000	50,000,000	-	-	-	149.725.000	6,280,000	-	-	-	99,51%	12.56%	-	-	0	0

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Anggaran dan Realisasi Tahun ke-					Rata- Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	45.000.000	-	525,000,000	275,000,000	108,887,300	44.498.000	-	378,002,000	385,040,500	102,852,300	98,88%	-	72%	100%	100%	15.971.825	14.588.575
Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Laj	-	-	380,000,000	600,000,000	411,348,550	-	-	331,811,500	495,745,300	400,787,190	-	-	87.32%	83%	97%	102.837.137	100.196.797
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	992.095.600	745.000.000	950,000,000	1,500,000,000	2,353,570,700	983.887.750	612.319.775	826,154,775	1,205,529,800	2,302,803,700	99,17	82,19	86.96%	80%	98%	355.368.825	329.728.987
Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	50.000.000	-	19,966,000,000	9,388,780,000	2,053,761,750	48.500.000	-	19,461,844,049	3,762,579,106	2,042,226,834	97,00	-	97.47%	80%	99%	500.940.437	498.436.208

Sumber : Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD DISPERKIMHUB Kabupaten Wonosobo (data diolah)

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan anggaran APBD DISPERKIMHUB Kabupaten Wonosobo sudah dilaksanakan secara efektif dimana capaian setiap program kegiatan dapat dikatakan sudah maksimal namun pada urusan pertanahan masih ada gap antara anggaran dengan realisasi anggaran khususnya pada Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan dikarenakan pada tahun 2017-2018 konflik pertanahan lebih sedikit daripada tahun sebelumnya sedangkan pengajuan anggaran diasumsikan seperti tahun sebelumnya serta pada Tahun 2020 terdapat *refocusing*.

2. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Kendati telah ditetapkan berbagai kebijakan di bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan di bidang perhubungan, tetapi upaya pengembangan sampai saat ini masih dihadapkan kepada tantangan dan peluang antara lain:

A. Tantangan

- Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :
 - a. Tingkat Back Log yang masih tinggi yaitu mencapai 36.615;
 - b. Tingginya jumlah rumah yang tidak layak huni;
 - c. Masih banyaknya kawasan kumuh di wilayah-wilayah;
 - d. Masih terdapat 60.296 RTLH yang belum tertangani;
 - e. Banyak rumah yang tergolong RTLH yang berada di kawasan rawan bencana sehingga belum bisa tertangani;
 - f. Masih terdapat beberapa perumahan di wilayah yang belum menyediakan atau bahkan tidak dilengkapi dengan PSU;
- Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan
 - a. Belum optimalnya penatagunaan tanah;
- Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan
 - a. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas serta tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan;
 - b. Moda sepeda motor yang memiliki persentase terbesar, sebagai akibat mudahnya persyaratan untuk memiliki kendaraan pribadi khususnya roda 2 (dua) sehingga meningkatkan jumlah pengguna sepeda motor di jalan dan kurangnya lahan parkir di kawasan perkotaan sehingga menimbulkan kemacetan dan kesemrawutan di Jalan;
 - c. Kamacetan lalu lintas (ruas jalan A. Yani dan Jalan Soekarno-Hatta);
 - d. Tidak seimbang pertumbuhan jumlah kendaraan dengan kapasitas jalan yang tersedia;
 - e. Tidak tersedianya area parkir di wilayah kota sehingga menggunakan badan jalan baik propinsi maupun jalan nasional yang menjadi tempat parkir;
 - f. Banyaknya pelanggaran keselamatan pengangkutan barang di jalan;
 - g. Luasnya wilayah kerja yang harus ditangani;
 - h. Masih ada angkutan barang yang dipergunakan untuk mengangkut orang sehingga mengakibatkan angkutan sepi;

B. Peluang

- a. Situasi keamanan daerah yang cukup kondusif;
- b. Berkembang pesatnya Bandara Wirasaba di Wilayah Kabupaten Purbalingga (Kabupaten tetangga);
- c. Pembangunan jalan Nasional/Propinsi dari Purwokerto ke Semarang menjadi peningkatan Perekonomian ;
- d. Jumlah penduduk yang cukup besar;

- e. RIPNAS Perkeretaapian_Reaktivasi Jalur Purwokerto-Wonosobo
- f. Perpres 38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) membuka peluang akselerasi penanganan RTLH dan Backlog (sektor perumahan rakyat) serta mewujudkan Wonosobo padang jembrang (sektor PJU).

Dalam menyusun Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan transportasi di wilayah Kabupaten Wonosobo.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Wonosobo terdiri atas 1) Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah yang meliputi penetapan struktur ruang wilayah, penetapan pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis. 2) Kebijakan strategis yang lainnya adalah masalah pengentasan kemiskinan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di segala sektor agar permasalahan yang bisa tertangani dengan baik.

Penataan Parkir merupakan persoalan yang sangat penting untuk segera di cari solusi agar masalah penataan yaitu dengan menguasai lahan atau area parkir of street agar lalu lintas menjadi lancar dan tertib serta Persoalan terminal mendolo yang telah diserahkan ke Pusat dalam pengelolaannya sedangkan target yang harus dipenuhi sementara mobil mobil angkutan yang masuk terminal tidak dikenakan retribusi, dan tidak adanya aturan yang jelas mengenai kewenangan peralihan dari pemerintah daerah ke pusat atau sebaliknya.

Dan Terminal Sawangan lahan masih sewa selama bertahun-tahun padahal dalam aturan tidak boleh, Sedangkan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman masih belum optimalnya SDM yang menangani standar kebutuhan dari unit kerja SKPD, masih terbatasnya sarana dan Prasarana penunjang kegiatan, serta tupoksi yang tumpang tindih menjadi tantangan buat bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dan dari bidang Pertanahan pun hampir sama dengan perumahan hanya ada tambahan yaitu keterbatasan data pendukung.

Berdasarkan atas persoalan tersebut Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengambil inisiatif di tuntut untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang lebih mumpuni serta sarana prasarana yang memenuhi kekurangan agar lebih optimal serta bisa mencapai semua target yang menjadi prioritas kebijakan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan hidup dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu. Pemenuhan perumahan dan permukiman menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah. Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dinas yang berperan dalam melaksanakan program dan kegiatan lingkup perumahan dan kawasan permukiman adalah DISPERKIMHUB Kabupaten Wonosobo, dimana salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas.

Moda Transportasi merupakan sektor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Transportasi berfungsi menjembatani antara wilayah yang satu dengan yang lainnya, yang terpisah oleh jarak. Pendorongan pembangunan transportasi sangat diharapkan memberikan dampak positif terhadap aktivitas masyarakat, seperti memberikan kelancaran mobilitas masyarakat serta menjamin keselamatan perjalanan. Sesuai dengan Visi Misi Bupati Wonosobo guna menjadikan **Wonosobo Yang Berdaya Saing Maju Dan Sejahtera** yaitu bertujuan terwujudnya pemerataan dalam pembangunan guna mengentaskan kemiskinan dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis mendukung pengembangan wilayah, dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan peningkatan hubungan Internasional.

Aktivitas sektor perhubungan pada saat ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi peranan masyarakat dan dunia usaha juga cukup besar. Pemerintah memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat, namun pelayan tersebut tidak memfasilitasi penumpang sepenuhnya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang modern, bahwa peranan pemerintah harus seminimal mungkin dan akan lebih efektif apabila kegiatan yang dapat dilakukan oleh pihak lain tidak dilakukan oleh lembaga pemerintahan, sehingga dapat mengikuti mekanisme pasar dan menjadi kompetitif.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan di Perkimhub di Wilayah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

Table 7.
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran

No.	Isu Strategis	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah	Data Dukung
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
1.	Masih rendahnya rumah tangga yang memiliki akses hunian layak	Masih rendahnya alokasi bantuan penyediaan rumah layak huni bagi warga masyarakat kurang mampu	Masih banyaknya rumah yang tidak layak huni	Ketidak mampuan masyarakat kurang mampu untuk membangun rumah layak huni	Data rasio rumah layak huni dan tidak layak huni
2.	Tingginya angka backlog rumah			Ketidakmampuan masyarakat kurang mampu untuk membangun rumah yang memadai	Data angka masyarakat tidak mampu / SK. Kumuh
3.	Belum optimalnya penanganan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh				
4.	Tingginya potensi rumah terkena bencana	Kondisi geografis Kabupaten Wonosobo yang sebagian besar perbukitan serta kontur tanah yang labil	Masih banyak pemukiman yang berada di lokasi tanah yang labil	Masyarakat yang tidak punya lahan lain untuk ditinggali	Data Pemetaan potensi bencana
5.	Masih rendahnya layanan penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan	Masih banyak Perumahan yang belum melakukan serah terima PSU ke Pemerintah Daerah	Banyaknya developer yang belum menyerahkan PSU, sedangkan developer tersebut sudah tidak ada	Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang mengatur tentang penyerahan PSU	Data penyerahan PSU
6.	Belum tersedianya pemutakhiran basis data perumahan dan kawasan permukiman skala detail	Mekanisme pendataan perumahan yang belum tersedia	Kesadaran pentingnya basis data perumahan dan kawasan permukiman masih rendah di tingkat basis (masyarakat)	Peran serta Perangkat Desa / Kelurahan yang masih rendah	Data skala kawasan
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian					

No.	Isu Strategis	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah	Data Dukung
7.	Rendahnya aset tanah pemerintah daerah yang bersertifikat	Proses pensertifikatan tanah aset pemerintah yang belum maksimal	Aset tanah Pemerintah Daerah yang belum bersertifikat masih banyak	Keterbatasan alokasi dana untuk pen sertifikatan aset tanah pemerintah daerah	Data aset tanah pemerintah
8.	Masih adanya konflik pertanahan	Konflik pertanahan yang sulit diselesaikan	Penyelesaian konflik pertanahan yang belum optimal	Kurangnya pengetahuan personil dibidang pertanahan dalam menyelesaikan konflik	Data konflik pertanahan
Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan					
9.	Belum optimalnya pelayanan angkutan umum/transportasi publik	Optimalisasi pelayanan angkutan umum/ transportasi publik yang belum tertata	Proses penyelenggaraan pelayanan angkutan umum belum maksimal	Rendahnya SDM yang berkompentensi di bidang perhubungan	Data Pegawai DISPERKIMHUB (ASN & Non ASN)
10.	Banyaknya potensi daerah rawan kecelakaan utamanya pada daerah dataran tinggi	Perlunya pencegahan pada daerah rawan kecelakaan	Kondisi geografis Kabupaten Wonosobo yang merupakan perbukitan	Kurangnya deliniasi jalan pada daerah rawan kecelakaan	Data Kecelakaan dan Data Sarpras
11.	Belum optimalnya pelayanan terminal tipe C	Terminal Tipe C tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Rendahnya SPM pada terminal tipe C karena fasilitas yang belum terpenuhi	Keterbatasan alokasi dana untuk optimalisasi fasilitas utama dan pendukung terminal tipe C	Data inventarisasi terminal Tipe C
12.	Terbatasnya sarana dan prasarana penyeberangan waduk	Belum jelasnya wewenang pengelolaan waduk	Sarana dan prasarana penyeberangan waduk yang dihibahkan ke DISPERKIMHUB belum optimal	Keterbatasan alokasi dana untuk optimalisasi sarana dan prasarana penyeberangan waduk	Data aset waduk
13.	Terbatasnya fasilitas kelengkapan lalu lintas jalan	Pembangunan fasilitas kelengkapan lalu lintas jalan yang belum merata	Fasilitas kelengkapan lalu lintas jalan yang belum terpenuhi di daerah pedesaan	Keterbatasan alokasi dana untuk memenuhi fasilitas kelengkapan jalan	Data fasilitas kelengkapan jalan
14.	Belum optimalnya penataan parkir	Pertumbuhan kendaraan dengan	Masih adanya titik lokasi parkir yang memicu titik kemacetan	Masih kurangnya jumlah kantong parkir & Tempat	Data Titik Parkir

No.	Isu Strategis	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah	Data Dukung
		tempat lokasi parkir yang timpang		parkir yang bertambah memakan bahu jalan	
15.	Masih kurangnya SDM di lingkungan OPD (PPNS dan Penguji Laik Layar)	DISPERKIMHUB belum bisa melaksanakan operasi yustisi dan uji laik prau karena belum ada ASN yang berkompeten di bidang tersebut	Operasi yustisi dan uji laik layar harus menggandeng instansi lain	Perlunya Diklat PPNS dan penguji kelayakan kapal	Tidak ada data PPNS dan Penguji kelayakan kapal

Sumber : Bagian Perencanaan DISPERKIMHUB (Data diolah)

A. Identifikasi faktor internal:

1. Kekuatan:

- a. Adanya dukungan pemerintah Kabupaten Wonosobo di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
- b. Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai;
- c. Tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang perencanaan dan pengembangan bidang transportasi.

2. Kelemahan:

- a. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang Perumahan Kawasan Permukiman Bidang Pertanahan dan di bidang perhubungan;
- b. Terbatasnya prasarana yang dimiliki oleh terminal;
- c. Bidang Perumahan Kawasan Permukiman masih adanya tupoksi yang tumpang tindih;
- d. Dibidang Pertanahan keterbatasan data masih menjadi kendala;

B. Identifikasi faktor eksternal:

1. Peluang:

- a. Adanya peran serta swasta, dinas/instansi lain di bidang lalu lintas dan angkutan serta perparkiran;
- b. Kebijakan dalam menjalankan pembangunan di bidang perhubungan;
- c. Situasi daerah yang cukup kondusif;

2. Tantangan:

- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang tertib lalu lintas di jalan;
- b. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan kapasitas jalan yang tersedia;
- c. Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa;
- d. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang prima di bidang transportasi.

Adapun identifikasi permasalahan utama dalam pelaksanaan pelayanan 5 (Lima) Tahun kedepan adalah:

- a. Kemacetan lalu lintas (ruas jalan A. Yani depan pasar induk, Garung depan pasar dan Simpang Kertek);
- b. Masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum baik dari aspek keamanan, kenyamanan maupun kemudahan;
- c. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan kapasitas jalan yang tersedia;
- d. Keterbatasan sarana dan prasarana perhubungan;
- e. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang tertib lalu lintas di jalan;

- f. Kelayakan Usaha angkutan waduk yang sangat tidak layak serta belum pernah ada dukungan prasarana dari pemerintah;
- g. Jumlah perlintasan sebidang jalan dan jalan kereta api yang terus berkembang seiring dengan perkembangan tata guna lahan dan reaktivasi kereta api;
- h. Lemahnya koordinasi di bidang perhubungan.

Dalam pembangunan transportasi sangat perlu diadakannya survey lapangan bertujuan mengidentifikasi permasalahan, kendala dan hambatanya, terlebih lagi merumuskan arah kebijakan dan strategi perencanaan terhadap pembangunan di bidang transportasi. Dalam pelaksanaannya, kebijakan dan strategi dijalankan dengan semestinya, tertib dan harus terlaksana. Pembenahaan dan penataan tidak akan menunjukkan perubahan jika itu tidak dilaksanakan. Untuk menjawab permasalahan diatas maka perlu adanya suatu kebijakan di bidang perhubungan, antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di wilayah Kabupaten Wonosobo;
- b. Meningkatkan sarana prasarana di bidang perhubungan;
- c. Meningkatkan edukasi tentang tertib berlalu lintas bagi pelajar dan masyarakat.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 merupakan visi dan misi yang sebelumnya telah menjadi materi kampanye oleh pasangan pemenang pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 lalu. Hal ini ditegaskan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyebutkan bahwa setiap calon wajib untuk menyertakan visi pada saat mencalonkan dirimenjadi kepala daerah.

Visi Pembangunan Kabupaten Wonosobo berpedoman pada arah pembangunan Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertuang dalam RPJPD tahap ke-4 yaitu 2021-2025, memperhatikan kondisi masyarakat Kabupaten Wonosobo saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah. Visi Kabupaten Wonosobo juga mempunyai semangat untuk menjalankan komitmen pembangunan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia, salah satu komitmen tersebut adalah sektor pembangunan desa. Kabupaten Wonosobo pada lima tahun kedepan akan memperhatikan pembangunan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini menjadi penting dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Wonosobo yang luas membuat akses pelayanan dan informasi berpotensi untuk tidak terdistribusi secara cepat dan merata. Pembangunan desa setidaknya juga merupakan langkah kongkrit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan kabupaten secara umum. Untuk mengupayakan hal itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menjadikan masyarakat desa

sebagai subyek pembangunan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016. Oleh karena itu perlu didukung sarana prasarana perhubungan yang memadai seperti adanya terminal di pusat-pusat pengembangan wilayah perdesaan.

Faktor penghambat internal yang mempengaruhi pencapaian misi, tujuan, sasaran, dan program Kepala Daerah sebagai berikut:

1. Terbatasnya anggaran yang ada guna memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana transportasi;
2. Terbatasnya sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada guna menunjang aktifitas kegiatan kedinasan;
4. Masih kurangnya pemahaman sumber daya manusia yang ada terhadap peraturan Perundang-Undangan di Bidang Transportasi dan Bidang Permukiman.

Faktor penghambat eksternal yang mempengaruhi pencapaian misi, tujuan, sasaran, dan program Kepala Daerah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat di dalam turut menjaga sarana dan prasarana transportasi;
2. Rendahnya kuantitas dan kualitas pelayanan transportasi yang disediakan oleh operator atau penyedia jasa transportasi;
3. Rendahnya disiplin masyarakat di dalam mentaati peraturan perundang-undangan di bidang transportasi;
4. Luasnya wilayah kerja di dalam melayani masyarakat;

Faktor pendorong internal yang mempengaruhi pencapaian misi, tujuan, sasaran, dan program Kepala Daerah sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia perhubungan yang ada memiliki etos kerja, tanggung jawab dan loyalitas yang tinggi;
2. Memiliki sarana dan prasarana guna menunjang aktifitas dan mobilitas kegiatan;
3. Adanya anggaran guna mendukung kegiatan.

Faktor pendorong eksternal yang mempengaruhi pencapaian misi, tujuan, sasaran, dan program Kepala Daerah sebagai berikut:

1. Adanya aturan perundang-undangan yang mendukung tugas-tugas kedinasan;
2. Adanya dukungan yang cukup kuat dari pihak legislatif maupun eksekutif;
3. Adanya dukungan dari operator angkutan umum di dalam menyediakan sarana transportasi;
4. Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi di dalam turut berkomitmen penyediaan sarana dan prasarana transportasi;
5. Kemudahan dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

3.3. Telaah Renstra Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, dan Renstra Dinas Perakim dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

A. Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran pembangunan transportasi Kementerian Perhubungan pada prinsipnya sejalan dengan sasaran pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024. Hal ini tentunya memiliki keselarasan dan interkoneksi yang memberikan pemahaman bahwa sasaran pembangunan nasional dapat dijabarkan kembali menjadi sasaran pada Kementerian Perhubungan yang secara khusus difokuskan pada perencanaan dan pembangunan transportasi.

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2020 - 2024 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2020-2024, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 - 2024 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

Pelayanan bidang Transportasi pada dasarnya tidak dapat dibatasi berdasarkan batas administrasi pemerintahan, oleh karena itu koordinasi antar tingkat pemerintahan menjadi sangat penting, disamping koordinasi lintas sektoral. Disamping itu, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan juga menjadi sangat penting, sehingga akan mempertegas tugas dan fungsi masing-masing lembaga pemerintah.

Provinsi Jawa Tengah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam sistem Nasional, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik, maupun hankam. Fungsi dan peranan tersebut sangat didukung oleh sistem transportasi Nasional dan regional yang cukup baik, yang mencakup transportasi darat, laut maupun udara. Dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan yaitu:

- a. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi;
- b. Meningkatnya Ketertiban Lalu Lintas di Jawa Tengah;
- c. Meningkatnya Pemenuhan Standart SDM Teknis Transportasi;
- d. Meningkatnya Jumlah Penumpang Yang Terlayani;
- e. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Transportasi.

Kinerja penyelenggaraan sistem transportasi terpadu ditentukan oleh berbagai *stake holders*, mengingat keterpaduan pelayanan transportasi ini mempunyai elemen penyelenggara yang cukup banyak, baik dari pihak pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat luas.

Pembangunan transportasi darat ditujukan untuk memadukan multimod transportasi lainnya sehingga diperoleh jaringan transportasi antar modayang terpadu. Untuk menunjang tercapainya

program prioritas pemerintah daerah dalam percepatan pemulihan ekonomi, maka pembangunan perhubungan diharapkan dapat memberikan multiplier effect dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan peningkatan produktifitas. Pengembangan angkutan penyeberangan dan sistem transportasi diperuntukan dalam meningkatkan pelayanan jasa perhubungan secara efisien, handal, berkualitas, aman dan harga terjangkau.

Adapun permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Sub Sektor Transportasi Darat

a. Permasalahan angkutan ASDP

- 1) Masih terbatasnya pelayanan ke Wilayah Kepulauan, terutama karenaketerbatasan prasarana dan sarana, tingginya biaya operasional dan jumlah penumpang yang terbatas;
- 2) Masih terbatasnya jumlah prasarana dan sarana penyeberangan;
- 3) Masih kurangnya keterpaduan pembangunan jaringan transportasi SDP dengan rencana pengembangan wilayah serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam sistem pengembangan prasarana dan sarana ASDP dalam era otonomi;
- 4) Masih perlunya peningkatan fasilitas keamanan dan standar keamanan penumpang;
- 5) Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan;
- 6) Masih perlunya subsidi untuk memberikan pelayanan kepada wilayah kepulauan dalam pelayanan angkutan sehingga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

b. Permasalahan Lalu Lintas Angkutan Jalan

- 1) Masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum, baik dari aspek keamanan, kenyamanan maupun kemudahan. Hal ini tidak terlepas dari kurang optimalnya aspek pengendalian dan standar yang ditetapkan. Kondisi ini juga diperparah dengan standar tarif angkutan umum yang rendah dan tidak ada subsidi pemerintah, sehingga pihak pengusaha angkutan umum hanya mampu menyediakan armada angkutan umum dengan standar pelayanan yang rendah;
- b. Masih rendahnya peranan angkutan umum dalam memberikan pelayanan menyebabkan kendaraan pribadi masih sangat dominan;
- c. Angkutan umum perkotaan masih didominasi oleh armada kecil (mikrolet);
- d. belum terintegrasinya antar dan inter moda;
- f. Masih tingginya tingkat kecelakaan yang disebabkan oleh tidak disiplinnya berlalu lintas di jalan;
- g. Masih tingginya tingkat pelanggaran terhadap muatan lebih angkutan barang.

2. Sub Sektor Sistem Transportasi Terpadu

Permasalahan

- a. Masih rendahnya peranan angkutan umum dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan transportasi yang murah, aman dan nyaman;
- b. Kualitas pelayanan angkutan umum yang masih rendah;
- c. Belum adanya standar pelayanan yang baku yang harus dijadikan acuan oleh para penyelenggara pelayanan angkutan umum;
- d. Belum adanya subsidi dari pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan rendah;
- e. Karena rendahnya kualitas pelayanan menyebabkan preferensi masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum menjadi sangat rendah;
- f. Koneksi inter dan antar moda yang masih sangat kurang sehingga aksesibilitas dan kenyamanan penumpang masih rendah;
- g. Koordinasi lintas kabupaten dan kota yang masih rendah.

Berdasarkan identifikasi sasaran dan permasalahan yang dalam rencana strategis Kementerian Perhubungan dan rencana strategis Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Tengah, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021 antara lain:

1. Faktor-faktor penghambat:

- a. Makin meningkatnya titik-titik kemacetan di wilayah Kabupaten Wonosobo terutama ruas jalan Ahmad Yani, Simpang Kertek dan Garung;
- b. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan tidak disiplinnya pengguna jalan, kualitas jalan yang kurang memadai, kurangnya sosialisasi ketertiban lalu lintas, kurangnya prasarana keselamatan jalan dan lemahnya penegakan aturan di bidang lalu lintas angkutan jalan;
- c. Faktor muat angkutan umum yang rendah sebagai akibat tingginya kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 dan 4;
- d. Kurangnya dukungan pemerintah daerah di dalam mengembangkan angkutan massal berbasis jalan;
- e. Tidak adanya subsidi angkutan umum dari pemerintah daerah sehingga berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas angkutan umum yang ada;
- f. Makin meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 dan 4 sebagai akibat pemerintah daerah tidak mampu menyediakan angkutan umum yang aman, nyaman, tepat waktu dan dengan harga yang terjangkau;

2. Faktor-faktor pendorong:

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung;
- b. Adanya komitmen yang kuat dari pihak pemerintah provinsi dan pusat untuk ikut berpartisipasi aktif mendukung pemerintah daerah;

- c. Terakomodirnya rencana kegiatan di dalam rencana tata ruang wilayah provinsi;
- d. Sumber daya manusia memiliki kualifikasi, loyalitas dan dedikasi yang tertinggi;
- e. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
- f. Kemudahan di dalam melaksanakan koordinasi dan mendapatkan informasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat;
- g. Tersedianya anggaran dana yang memadai;
- h. Kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang berpihak kepada masyarakat terutama di daerah-daerah pedesaan;
- i. Adanya rangsangan (*stimulus*) dari pemerintah pusat dan provinsi terhadap daerah-daerah yang memiliki prestasi;
- j. Adanya dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

B. Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Dinas Perakim Provinsi Jawa Tengah

Sasaran pembangunan Perumahan Kawasan Permukiman di Kementerian PUPR pada prinsipnya sejalan dengan sasaran pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024. Hal ini tentunya memiliki keselarasan dan interkoneksi yang memberikan pemahaman bahwa sasaran pembangunan nasional dapat dijabarkan kembali menjadi sasaran pada bidang Permukiman yang secara khusus difokuskan pada perencanaan dan pembangunan kota tanpa permukiman kumuh.

Seperti halnya yang tertuang pada RPJMN ke-4 (2020 – 2024) Salah satu sasaran dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan adalah terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. Peran pemerintah akan lebih difokuskan pada perumusan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana.

Sasaran Strategis pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan 4 misi dan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard (BSC)* yang dibagi ke dalam 4 perspektif, yaitu perspektif *Stakeholders*, *Perspektif Customers*, *Perspektif Internal Process* Dan *Perspektif Learning & Growth*. Untuk mempermudah implementasi dalam pencapaian Sasaran Strategis dari system penganggaran, maka pendekatan BSC dikombinasikan dengan pendekatan penyusunan system penganggaran berbasis kinerja. Sasaran Strategis beserta indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian pada setiap perspektif yang akan dicapai Kementerian PUPR pada periode 2020-2024.

Isu strategis utama yang akan dihadapi dalam pembangunan infrastruktur permukiman pada tahun 2020-2024, yakni kurang komprehensifnya pembangunan dalam meningkatkan kebutuhan layanan infrastruktur permukiman. Isu strategis ini muncul dan menjadi perhatian karena dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan layanan infrastruktur permukiman;
- b. Kurang optimalnya sinergi antar sektor dalam perencanaan dan pembangunan berbasis entitas kawasan, dimana permasalahan utama dan kebutuhan kawasan belum menjadi landasan penyelesaian masalah kawasan;
- c. Terbatasnya kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah untuk melanjutkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman;
- d. Kurang optimalnya tata kelola pemanfaatan dan pengendalian infrastruktur permukiman yang telah terbangun;
- e. Terbatasnya kewenangan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman, khususnya untuk kegiatan di hilir;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan lainnya untuk mendukung keterbatasan pendanaan; dan
- g. Kerentanan permukiman terhadap bencana, baik alam maupun non-alam (termasuk pandemi wabah penyakit), serta mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.

Sasaran Pembangunan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tertuang pada Renstra Disperakim Prov. Jateng (2018 – 2023) memuat sasaran kerja perangkat daerah yang meliputi aspek : (i) Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan Masyarakat Yang Memiliki Keterbatasan Akses Pembiayaan Perumahan, (ii) Meningkatnya kualitas kawasan permukiman, dan (iii) Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pelayanan pada bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada dasarnya tidak dapat dibatasi berdasarkan batas administrasi pemerintahan, oleh karena itu koordinasi antar tingkat pemerintahan menjadi sangat penting, disamping koordinasi lintas sektoral juga perlu kejelasan tanggungjawab dan kewenangan yang menjadi hal penting, sehingga akan mempertegas tugas dan fungsi masing-masing lembaga pemerintah.

Berdasarkan identifikasi sasaran dan permasalahan yang dalam rencana strategis Kementerian PUPR dan rencana strategis Dinas Perakim Provinsi Jawa Tengah, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi rencana strategis Dinas Perkimhub Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021 antara lain:

- (1) Tantangan :
 - a. Rendahnya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pembiayaan perumahan;
 - b. Meningkatnya kebutuhan rumah layak huni dan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang baik
- (2) Peluang
 - a. Tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan anggaran bantuan keuangan Provinsi dan DAK untuk penyelenggaraan perumahan dan permukiman di daerah;
 - b. Keberadaan pihak swasta/ pengembang yang berperan serta dalam penyediaan/ pemenuhan perumahan bagi masyarakat.

3. 4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Renstra Dinas Pekimhub perlu memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 yang bertujuan mewujudkan Daerah berbasis agroindustri dan pariwisata yang didukung oleh pertanian berkelanjutan. Sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Wonosobo. Sebagaimana diketahui, Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Wonosobo terdiri atas 1) Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah yang meliputi penetapan struktur ruang wilayah, penetapan pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis serta penetapan fungsi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; 2) Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah memuat kebijakan dan strategi sistem perdesaan; kebijakan dan strategi sistem perkotaan; kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.. Lebih lanjut, untuk mengembangkan rencana fungsi dan sistem kewilayahan, ditetapkan sebanyak 6 (enam) Wilayah Pengembangan Kabupaten Wonosobo, yang terdiri atas: 1) WP I Wonosobo-Selomerto; 2) WP II Kertek-Kalikajar; 3) WP III Sapuran-Kepil-Kalibawang; 4) WP IV Kaliwiro-Wadaslintang; 5) WP V Leksono-Sukoharjo-WatuWonosobo; 6) WP VI Mojotengah-Garung-Kejajar.

Arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Kabupaten Wonosobo untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, pemerataan pembangunan, mempermudah mobilitas penduduk dari suatu daerah menuju daerah yang lain dan keseimbangan antar daerah, utamanya di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan ditujukan untuk:

- a) Meningkatkan daya dukung, kapasitas, dan kualitas jalan Kabupaten Wonosobo;
- b) Meningkatkan aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang di wilayah Kabupaten Wonosobo.

Sarana dan prasarana strategis dalam rangka mendukung daya saing daerah, meliputi:

- a) mendukung pengembangan Bandar Udara JB Soedirman yang kedepan perlu di tingkatkan kapasitasnya lebih besar lagi sehingga dapat menambah maskapai dan jumlah penerbangan sesuai dengan kebutuhan untuk melayani beberapa Kabupaten/Kota di bagian Selatan Tengah Jawa Tengah)
- b) Pembangunan jalan tol Wonosobo-Batang melanjutkan tol Semarang-Pejagan, sehingga akan terhubung layanan tol antara Kota Semarang dengan Dulongmas sebagai salah satu pusat pertumbuhan dan Kabupaten Wonosobo sebagai kabupaten lima besar destinasi pariwisata di Jawa Tengah;
- c) Pembangunan Jalan Lintas Tengah Jawa Tengah dimana wilayah Kabupaten Wonosobo merupakan titik tengah yang akan menghubungkan Wonosobo-Purwokerto (ke Barat), Wonosobo-Semarang melalui Temanggung (ke Timur), dan Wonosobo-Yogyakarta melalui Borobudur-Magelang (ke Selatan-Timur) dengan demikian potensi yang selama ini belum tergali karenahambatan transportasi di Wonosobo akan segera berkembang seperti potensi hortikultura, perkebunan, dan perikanan darat, serta tidak kalah pentingnya adalah obyek wisata Dieng serta desa-desa wisata yang cukup banyak di Wonosobo Utara dan pengembangan pariwisata di Kawasan Dieng diproyeksi jadi beyond Bali.

Kebijakan penataan ruang pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Wonosobo Tahun 2011 – 2031 meliputi:

- a. Pengembangan agroindustri berbasis potensi lokal;
- b. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan;
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah;
- d. Percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat kegiatan secara berhirarki;
- e. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif;
- f. Peningkatan fungsi pelestarian kawasan lindung;
- g. Pengembangan fungsi sosial budaya masyarakat dalam pembangunan wilayah; dan
- h. Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Perkimhub ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan PSU dan penyelesaian ijin lokasi;
2. Belum semua lingkungan perumahan didukung dengan penyediaan PSU;
3. Belum semua rumah korban bencana terrehabilitasi/ tertangani dengan baik;
4. Penanganan kawasan kumuh belum optimal;

5. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman sehingga berpotensi tumbuhnya kawasan permukiman kumuh baru di perkotaan;
6. Masih terdapat RTLH;
7. Kurangnya kebijakan pemerintah daerah di dalam menata dan mengembangkan transportasi pada sektor perhubungan;
8. Sulitnya memperoleh lahan guna mengembangkan prasarana transportasi;
9. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi pengadaan dan pemasangan prasarana transportasi;
10. Kualitas dan ketersediaan sarana transportasi yang tersedia dalam melayani masyarakat sangat rendah;
11. Kurangnya anggaran guna pengadaan sarana transportasi dan subsidi terhadap angkutan umum.

Faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Perkimhub ditinjau dari implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penataan ruang kota;
2. Penyediaan infrastruktur perumahan permukiman yang belum memadai dan terbatas;
3. Terbatasnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah;
4. Tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Wonosobo yang berakibat pada tingkat kualitas udara menjadi menurun sebagai akibat gas buang dari kendaraan bermotor;
5. Belum semua kendaraan melaksanakan uji emisi gas buang;
6. Belum tegasnya aturan perundang-undangan terhadap pelanggaran emisi gas buang;
7. Tidak adanya penampungan limbah sisa-sisa suku cadang dan pelumas kendaraan bermotor pada bengkel kendaraan bermotor sehingga terjadi pencemaran tanah dan air.

3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Adapun isu – isu strategis yang terkait dengan urusan di DISPERKIMHUB, sebagai berikut:

- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 - (1) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:
 - Masih rendahnya rumah tangga yang memiliki akses hunian layak;
 - Tingginya angka backlog rumah;
 - Belum optimalnya penanganan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh;
 - Tingginya potensi rumah terkena bencana;
 - Masih rendahnya layanan penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan;
 - Belum tersedianya pemutakhiran basis data perumahan dan kawasan permukiman skala detail;

- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
- (1) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan :
- Rendahnya aset tanah pemerintah daerah yang bersertifikat;
 - Masih adanya konflik pertanahan;
- (2) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan:
- Belum optimalnya pelayanan angkutan umum/transportasi publik;
 - Banyaknya potensi daerah rawan kecelakaan utamanya pada daerah dataran tinggi;
 - Belum optimalnya pelayanan terminal tipe C;
 - Terbatasnya sarana dan prasarana penyeberangan waduk;
 - Terbatasnya fasilitas kelengkapan lalu lintas jalan;
 - Belum optimalnya penataan parkir;
 - Pengembangan kawasan Dieng sebagai Destinasi Wisata Internasional membutuhkan moda transportasi yang memiliki aksesibilitas tinggi, mudah diperoleh dan dengan biaya yang terjangkau;
 - Masih kurangnya SDM di lingkungan OPD (PPNS dan Uji Layak Prau);
- c. Isu Prioritas Indikator SDGs Kabupaten Wonosobo berkaitan dengan DISPERKIMHUB
- (1) Kota & permukiman berkelanjutan :
- Kurangnya kemitraan dalam pembangunan dan perlindungan;
 - Penyediaan infrastruktur yang belum memadai dan terbatas;
 - Stabilitas Keamanan dan Ketertiban yang belum tercapai;
 - Terbatasnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah, Tingginya angka kemiskinan;
 - Tingginya kerawanan bencana.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan

- (1) Peningkatan kualitas pelayanan Perkimhub;
- (2) Tersedianya Sarana Prasarana Perkimhub guna mendukung pembangunan di wilayah Kabupaten Wonosobo;
- (3) Terwujudnya Program Unggulan Kabupaten Wonosobo Yaitu “Wonosobo Maer dan Wonosobo Aman”

4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan

- (1) Meningkatkan kinerja pelayanan Perkimhub;
- (2) Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten;
- (3) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan terminal, halte dan dermaga pada setiap kecamatan atau minimal di pusat pertumbuhan yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek;
- (4) Meningkatnya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, APILL, paku jalan, patok pengaman jalan, cermin tikungan dan marka) pada jalan Kabupaten;
- (5) Mewujudkan kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan.
- (6) Mewujudkan program Perkim 100-0-100,
- (7) Mewujudkan sertifikasi tanah aset pemerintah kabupaten,
- (8) Mewujudkan terminal terpadu dan halte keselamatan jalan,
- (9) Mewujudkan kelancaran dan ketertiban LLAJ pada Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Strategis.

4.3. Program Unggulan

Program unggulan yang diamanahkan pada RPJMD 2021 – 2026 Kabupaten Wonosobo kepada Disperkimhub ada dua (2) yaitu **“Wonosobo Maer dan Wonosobo Aman”**.

“Wonosobo Maer” dalam bahasa lokal berarti bagus merupakan program yang ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah serta mengolah daya Tarik pariwisata, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan yang didukung dengan pelayanan publik yang berkualitas baik pada sumberdaya manusia maupun sarana prasarananya. Pengembangan wajah Wonosobo ke depan juga mempertimbangkan filosofi sesuai branding *Soul of Java*, yang mencakup tiga aspek yaitu perdagangan, investasi dan pariwisata. Implementasi uraian kegiatan pada program unggulan ini yaitu Penataan kota dan/atau ibukota kecamatan, yang di uraikan kembali untuk Disperkimhub dalam kegiatan “Replikasi dan Fasilitasi Program Kotaku”.

Sedangkan untuk **“Wonosobo Aman”** mengandung arti cita-cita kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, bebas dari rasa takut dan kekhawatiran dan masyarakat yang merasa "handarbeni" terhadap lingkungan yang ada. “Wonosobo Aman” ini sekaligus memberikan jaminan bagi wisatawan dan investor di Wonosobo. Terwujudnya kondisi yang aman, tentram dan tertib diimplementasikan melalui salah satunya **Penataan dan penertiban**

fasilitas umum, yang dapat diuraikan melalui Penataan dan penertiban parkir dan fasilitas keselamatan jalan lainnya. Program unggulan “Wonosobo Aman” diharapkan meningkatkan keamanan dan kenyamanan terutama berinvestasi dan berwisata. serta **“Wonosobo Maer”** dalam yang diimplementasikan dalam bentuk peningkatan jalan kabupaten prioritas pada jalan penghubung simpul pariwisata, simpul produksi/pertanian, desa miskin, kawasan perbatasan/pinggiran dan jalur evakuasi bencana, penataan kota dan/atau ibu kota kecamatan, dan pengembangan kawasan perdesaan prioritas. Program unggulan ini diuraikan dalam kegiatan Penataan dan penertiban fasilitas umum, yang diuraikan kembali untuk Disperkimhub dalam kegiatan “Penataan dan penertiban parkir dan fasilitas keselamatan jalan lainnya.”

Table 8.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun Ke -				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pelayanan public		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik	65,00	67,00	69,00	71,00	73,00
	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	65,76	66,42	68,64	70,64	72,47
	Meningkatkan pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50
2.	Meningkatkan infrastruktur pengembangan wilayah yang berkualitas		Indeks Infrastruktur Wilayah	60,1	62,09	64,38	66,12	67,74
	Meningkatkan keselamatan lalu lintas	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Indeks Keselamatan Lalu Lintas	66,81	69,43	72,00	73,72	75,15
	Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman layak huni	Tersedianya perumahan dan kawasan permukiman layak huni	Persentase permukiman layak huni	70,60	71,70	72,80	73,90	75,00
3.	Meningkatkan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Yang Berkualitas		Indeks Perkembangan Wilayah	0,63	0,65	0,68	0,70	0,73
	Meningkatkan aksesibilitas wilayah dan konektivitas wilayah	Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Indeks Aksesibilitas Wilayah	1,08	1,08	1,08	1,26	1,26
		Meningkatnya konektivitas wilayah	Rasio Konektivitas Wilayah	93,50	94,50	95,00	96,50	97,00

Sumber : RPJMD Kabupaten Wonosobo 2021 - 2026

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Strategi adalah merupakan kebijakan yang diambil berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan lingkungan strategis Dinas Perkimhub Kabupaten Wonosobo. Pencapaian tujuan dan sasaran misi keempat ini didukung dengan program unggulan **“Wonosobo Maer Wonosobo Aman”** dalam bentuk peningkatan jalan kabupaten prioritas pada jalan penghubung simpul pariwisata, simpul produksi/pertanian, desa miskin, kawasan perbatasan/pinggiran dan jalur evakuasi bencana, penataan kota dan/atau ibu kota kecamatan, dan pengembangan kawasan perdesaan prioritas.

Strategi yang diperlukan dan ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati serta untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi melalui peningkatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas angkutan jalan dengan prioritas pada:
 - peningkatan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan terutama pada ruas jalan strategis dan afirmatif;
 - sinkronisasi penyediaan fasilitas perlengkapan jalan dengan lokasi peningkatan jalan;
 - peningkatan penyediaan fasilitas kelengkapan keselamatan jalan (guardrail, Penerangan Jalan Umum (PJU) dan lain-lain) pada ruas jalan dengan tingkat kerawanan tinggi;
 - peningkatan kerjasama pendanaan untuk penyediaan fasilitas perlengkapan jalan seperti alat penerangan jalan umum;
 - perbaikan tata kelola parkir;
 - pengembangan pusat pertumbuhan berbasis *Transit Oriented Development* (TOD). Prioritas ini mendukung rencana program/kegiatan yang tercantum dalam Perpres 79/2019 yaitu reaktivasi Kereta Purwokerto Wonosobo dan Perda No. 16 Tahun 2019 yaitu program pengembangan kereta api regional.
- b. Mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif dan berkelanjutan melalui fasilitasi penyediaan akses rumah layak huni, percepatan penanganan kawasan kumuh, optimalisasi pencegahan kawasan kumuh, penyediaan prasarana dan sarana utilitas yang terpadu dan berkelanjutan, peningkatan kapasitas lembaga penyedia perumahan dengan prioritas pada:
 - Fasilitasi perbaikan rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin. Prioritas ini mendukung rencana program/kegiatan yang tercantum dalam perpres 79/2019 yaitu bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) jawa tengah;
 - Percepatan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana;

- Kolaborasi penanganan dan pencegahan kawasan kumuh;
- Peningkatan penyediaan PSU berupa jalan lingkungan dan saluran drainase permukiman;
- Fasilitasi pembinaan pengembang kecil.

5.2. Arah Kebijakan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Sehubungan dengan itu, Dinas Perkimhub Kabupaten Wonosobo menetapkan kebijakan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas pelayanan di Pengujian Kendaraan Bermotor

Pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang berperan penting dalam menunjang kelancaran mobilitas masyarakat untuk beraktivitas di sektor-sektor lain. Konsep program pengujian kendaraan bermotor mempunyai dua aspek yaitu: keamanan (*safety*) dan pencemaran (*pollution*). Aspek keamanan menyangkut kelaikan kendaraan di jalan raya sedangkan aspek pencemaran terkait dengan tingkat emisi kendaraan bermotor. Di dalam program pemeliharaan kendaraan bermotor terdapat komponen pengujian yang lazim dikenal dengan Uji Kendaraan Bermotor (atau dalam bahasa keseharian disebut Keur) dilaksanakan oleh Dinas Perkimhub. Peran sistem pengujian dalam pencapaian kriteria tersebut adalah sangat menentukan, walaupun dalam implementasinya akan menghadapi berbagai masalah yang sangat kompleks, karena memerlukan suatu penanganan yang terpadu dalam memastikan kelayakan jalan seluruh kendaraan bermotor secara berkesinambungan. Oleh karena itu, menerapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Menyediakan peralatan pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar mutu dan prasarana yang nyaman bagi para wajib uji;
2. Meningkatkan kompetensi bagi tenaga penguji dengan mengikutsertakan pada pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun non teknis.

b. Meningkatkan Prasarana Transportasi guna mendukung pembangunan di wilayah Kabupaten Wonosobo

Dalam rangka meningkatkan prasarana transportasi maka Dinas Perkimhub menerapkan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan studi tentang evaluasi jaringan trayek angkutan umum di wilayah Kabupaten Wonosobo;
2. Peningkatan pengadaan prasarana transportasi;
3. Peningkatan fasilitas perlengkapan jalan.

Table 9.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera			
MISI IV : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas, Berkeadilan, Dan Berkelanjutan Untuk Menciptakan Pembangunan Yang Merata			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
4.1:Meningkatkan infrastruktur pengembangan wilayah yang berkualitas dengan sasaran:	4.1.5:Meningkatnya keselamatan lalu lintas	4.1.5.1:Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi	4.1.5.1.1:Peningkatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas angkutan jalan
	4.1.6:Tersedianya perumahan dan kawasan permukiman layak huni	4.1.6.1. Mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan	4.1.6.1.1. Fasilitasi penyediaan akses rumah layak huni
			4.1.6.1.2. Percepatan penanganan kawasan kumuh
			4.1.6.1.3.Optimalisasi pencegahan kawasan kumuh
			4.1.6.1.4. Penyediaan prasarana dan sarana utilitas yang terpadu dan berkelanjutan
			4.1.6.1.5.Peningkatan kapasitas lembaga penyedia perumahan
4.2:Meningkatkan perkembangan wilayah	4.2.1:Meningkatnya aksesibilitas, konektivitas dan penataan ruang wilayah	4.2.1.1:Memperkuat koridor pertumbuhan wilayah dan koridor pemerataan wilayah yang berkelanjutan	Kebijakan 4.2.1.1.2 : Peningkatan konektivitas wilayah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perkimhub, Kabupaten Wonosobo telah menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Program sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkimhub untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat. Dengan demikian program yang ada didalam RPJMD perlu dijabarkan dan dikembangkan menjadi program dan rencana aksi melalui Renstra Dinas Perkimhub, RKPD dan Renja Dinas Perkimhub sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kondisi dan situasi obyektif berdasarkan kajian dan hasil musyawarah pembangunan.

Program dan kegiatan Dinas Perkimhub merupakan urusan wajib non pelayanan yang harus dilaksanakan dalam mendukung pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo. Adapun program dan kegiatan tersebut untuk tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

- Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:

- a. Program Pengembangan Perumahan
 - (1) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - a. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota;
 - b. Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan;
 - c. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani;
 - d. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
 - e. Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota;
 - f. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus.
 - (2) Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - a. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana;
 - b. Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan.

- (3) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - a. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana;
 - b. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana;
 - c. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- (4) Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - a. Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
 - b. Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
- (5) Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
 - a. Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun.
- (6) Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
- (7) Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyediaan akses rumah layak huni, dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase rumah tidak layak huni yang tertangani, persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan persentase rumah tangga yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

b. Program Kawasan Permukiman

- (1) Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
 - a. Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh;
 - b. Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan permukiman dan Permukiman Kumuh;
- (2) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 - a. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh;
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh.
- (3) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

- a. Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh;
- b. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh;
- d. Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh

Program ini diarahkan pada percepatan penanganan kawasan kumuh. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase luas kawasan permukiman kumuh di kabupaten yang ditangani dan persentase penetapan kebijakan rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh sampai dinyatakan sah (legal). Dalam upaya untuk mereview kembali dokumen RP3KP maka perlu adanya revisi dan penganggaran pada Perubahan tahun 2022 yang dilaksanakan melalui sub kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh. Dalam rangka percepatan pencapaian kinerja program dan mendukung kinerja daerah, implementasi yang akan dilaksanakan sekaligus menjadi program unggulan daerah yaitu replikasi dan fasilitasi program kotakumuh.

- c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - (1) Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Program ini diarahkan pada optimalisasi pencegahan kawasan kumuh. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan permukiman kumuh yang tertangani

- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - (1) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - a. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan;
 - b. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian;
 - c. Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang;
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

Program ini diarahkan pada penyediaan prasarana dan sarana utilitas yang terpadu dan berkelanjutan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas

umum) dan persentase satuan permukiman yang memiliki jalan lingkungan dan drainase kondisi baik.

e. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

(1) Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas lembaga penyedia perumahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase pengembang perumahan kualifikasi kecil yang bersertifikasi.

- Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan :

f. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

(1) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

a. Inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota;

b. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Program ini diarahkan optimalisasi penatagunaan tanah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi.

g. Program Penatagunaan Tanah

(1) Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

a. Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan optimalisasi penatagunaan tanah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan :

h. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

(1) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

a. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

(2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;

- b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan.
- (3) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal;
 - b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung).
- (4) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
- (5) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - b. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- (6) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - a. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;
 - b. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota.
- (7) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin;
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin;
 - c. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin.
- (8) Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
 - a. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
- (9) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada peningkatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas angkutan jalan, untuk mencapai indikator kinerja persentase ruas jalan kabupaten yang dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan, persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten atau kota, persentase terminal tipe C kondisi baik dan berfungsi optimal, persentase kendaraan wajib uji yang melakukan uji berkala kendaraan bermotor, persentase parkir tepi jalan umum yang tertata, persentase tersedianya fasilitas parkir sistem elektronik, persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi,

persentase sarana transportasi yang memenuhi standar keselamatan, persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C, persentase pelaksanaan pelayanan uji berkala dan V/C rasio pada jalan kabupaten. Dalam rangka percepatan pencapaian kinerja program dan mendukung kinerja daerah, implementasi yang akan dilaksanakan sekaligus menjadi program unggulan daerah yaitu penataan dan penertiban parkir dan fasilitas keselamatan jalan lainnya.

- i. Program Pengelolaan Pelayaran
 - (1) Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - (2) Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota;
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - (3) Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau;
 - b. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau.

Program ini diarahkan pada peningkatan konektivitas wilayah. program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase dermaga penyeberangan waduk dalam kondisi baik.

- j. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - (3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - (4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- (5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - a. Pengadaan Mebel;
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- (6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- (7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan Mebel;
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan selama 5 (lima) tahun ke depan dapat di lihat pada tabel 10. Berikut:

Table 10.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Kabupaten Wonosobo

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome/Output), Sub kegiatan (Output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	BASE LINE		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026					
											Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																								
1	Menyediakan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni					Persentase Permukiman Layak Huni	Luas permukiman layak huni terhadap luas permukiman total x 100	%	68,4	69,5	70,6	842.500.000	71,7	685.358.320	72,8	686.796.435	73,9	691.427.045	75	695.318.171	75	695.318.171	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo
	Meningkatnya permukiman layak huni					Persentase Permukiman Layak Huni	Luas permukiman layak huni terhadap luas permukiman total x 100	%	68,4	69,5	70,6	842.500.000	71,7	685.358.320	72,8	686.796.435	73,9	691.427.045	75	695.318.171	75	695.318.171	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani pada tahun N+ Tahun (N-1)/ jumlah total rumah tidak layak huni di Kabupaten Wonosobo x 100	%	19,25	21,45	29,41	842.500.000	37,37	685.358.320	45,33	686.796.435	53,29	691.427.045	61,25	695.318.171	61,25	695.318.171	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo
						Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah rumah terkena bencana yang ditangani/jumlah rumah yang direncanakan untuk ditangani x 100	%	20	21	100		100		100		100		100		100,00		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome/Output), Sub kegiatan (Output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	BASE LINE		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
									2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
						Jumlah rumah tangga yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan +rumah tangga penerima subsidi uang sewa+ rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni atau relokasi jumlah rumah tangga yang direncanakan menerima relokasi x 100	%	100	100	100		100		100		100		100		100,00			Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota		Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah rumah terkena bencana yang ditangani/jumlah rumah yang direncanakan untuk ditangani x 100	%	0	0	1	180.000.000	2	150.740.500	2	166.035.822	2	141.986.731	2	142.785.787	2	142.785.787		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo
				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah rumah tangga yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan +rumah tangga penerima subsidi uang sewa+ rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni atau relokasi jumlah rumah tangga yang	%			0	-	0	-	0	-	1	10.000.000	0	-	0	-		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome Intermediet/Output), Sub kegiatan (Output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	BASE LINE		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
									2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026										
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
							direncanakan menerima relokasi x 100																						
					Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah dokumen data BNBA masyarakat calon penerima bantuan RTLH, PK, dan PB Bencana	Jumlah dokumen data BNBA masyarakat calon penerima bantuan RTLH, PK, dan PB Bencana	dokumen				0	-	0	-	1	30.000.000	0	-	0	-	1	-			Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo		
					Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana dan Lokasi Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota pada tahun ke-N	Dokumen				0	-	0	-	1	10.522.534	1	10.593.480	1	10.653.098	1	10.653.098			Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo		
					Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan sampai tahun ke-N	Dokumen				0	-	0	-	1	25.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-			Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo
					Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani pada tahun ke-N	Dokumen				1	180.000.000	1	150.740.500	1	100.513.288	1	121.393.251	1	122.132.689	1	122.132.689			Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo		
					Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan	Dokumen				0	-	0	-	0	-	0	-	1	10.000.000	1	10.000.000			Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo		

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome intermediet/Output), Sub kegiatan (Output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	BASE LINE		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
									2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
							Rumah pada tahun ke-N																		
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi pada tahun ke-N	Dokumen	1	1	4	30.000.000	4	24.404.450	4	24.455.659	4	24.620.548	4	24.759.104	4	24.759.104	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	
				Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana		Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus pada tahun ke-N	Dokumen			0	-	25	24.404.450	25	24.455.659	25	6.461.161	0	-	0	-	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	
				Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan		Jumlah dokumen sosialisasi penanganan rumah	Jumlah dokumen sosialisasi penanganan rumah	dokumen			0	-	0	-	0	-	0		1	5.000.000	1	5.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	
				Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator		Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota pada tahun ke-N	orang			9	30.000.000	0	-	0	-	10	18.159.387	10	19.759.104	10	19.759.104	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban		Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan	Dokumen	N/ A	25	25	635.500.000	27	2.490.213.370	29	436.200.038	31	474.377.026	33	477.046.665	33	477.046.665	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan	Kab. Wonosobo	

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome/Output), Sub kegiatan (Output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	BASE LINE		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026					
											Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			berdasarkan Jenis Layanan pada tahun ke-N																Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih pada tahun ke-N	orang			10	285.500.000	12	2.194.411.556	14	194.819.498	16	146.133.036	18	197.236.809	70	3.018.100.899	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo
				Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah unit rumah yang ditangani	Jumlah unit rumah yang ditangani	unit			10	350.000.000	9	295.801.814	8	241.380.540	7	228.243.990	9	279.809.856	43	1.395.236.200	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo
				Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi sampai dengan tahun ke-N	unit rumah	0	0	0	-	0	-	0	-	2	100.000.000	0	-	2	100.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo
				Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun sampai dengan tahun ke-N	unit rumah	0	0	0	-	0	-	3	30.062.950	3	30.265.644	3	30.435.969	3	30.435.969	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo
				Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program		Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi	unit rumah	0	0	0	-	0	-	1	20.062.950	1	30.265.644	1	30.435.969	1	30.435.969	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome Intermediet/Output), Sub kegiatan (Output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	BASE LINE		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026					
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					Kabupaten/Kota		Program Kabupaten/Kota yang Terbangun pada tahun ke-N																	
					Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan sosialisasi serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan sosialisasi serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	lokasi	0	0	0	-	0	-	1	10.000.000	0	-	0	-	1	10.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo
				Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umumdan/ atau Rumah Khusus	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota pada tahun ke-N	Laporan	0	0	0	-	0	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	10.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	
				Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota pada tahun ke-N	Dokumen	0	0	0	-	0	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	10.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah bimtek/sosialisasi /pelatihan pengelolaan rumah susun	Jumlah bimtek/sosialisasi /pelatihan pengelolaan rumah susun pada tahun ke-N	angka	0	0	0	-	0	-	1	20.041.966	1	20.177.096	1	20.290.646	1	20.290.646	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome/Output), Sub kegiatan (Output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	BASE LINE		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026					
											Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun pada tahun ke-N	Laporan	0	0	0	-	0	-	1	10.041.966	1	10.177.096	1	10.290.646	1	10.290.646	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo
					Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah izin (pengesahan site plan) pembangunan perumahan yang dikeluarkan	Jumlah izin (pengesahan site plan) pembangunan perumahan yang dikeluarkan pada tahun ke-N	dokumen	0	0	0	-	0	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo
				Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan pada tahun ke-N	Laporan	0	0	0	-	0	-	1	10.000.000	0	-	0	-	1	10.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) PerumahanUmum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) PerumahanUmum/Rumah Susun Umum pada tahun ke-N	Laporan	0	0	0	-	0	-	1	10.000.000	0	-	0	-	1	10.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			Persentase luas kawasan permukiman kumuh di kabupaten yang ditangani	Luas permukiman layak huni terhadap luas permukiman total x 100	%	6,19	16,69	33	18.275.000.000	45	13.866.377.805	56	13.897.572.514	72	13.998.016.905	100	14.082.420.854	100	14.082.420.854	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome), Sub kegiatan (Output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	BASE LINE		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
									2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026							
											Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
						Persentase penetapan kebijakan rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman Kumuh sampai dinyatakan sah (legal)	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun/jumlah satu dokumen RP3KPKP lengkap dan sudah disahkan x 100	%	0	0	10		50		100		100		100		100					
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		Persentase penetapan kebijakan rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman Kumuh sampai dinyatakan sah (legal)	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun/jumlah satu dokumen RP3KPKP lengkap dan sudah disahkan x 100	%	0	0	0	-	2	125.000.000	1	50.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		Jumlah Penerbitan izin Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun/jumlah satu dokumen RP3KPKP lengkap dan sudah disahkan x 100	dokumen			0	-	2	125.000.000	1	50.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh pada tahun ke-N	Laporan	1	1	1	90.000.000	1	70.876.213	1	76.046.909	1	76.596.536	1	77.058.390	1	77.058.390	1	77.058.390	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo
				Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		Jumlah dokumen penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh yang disusun pada tahun N	Jumlah dokumen penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh yang disusun pada tahun ke-N	dokumen			0	-	0	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome/Output), Sub kegiatan (Output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	BASE LINE		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
									2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp. (000)				
											Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh pada tahun ke-N	Dokumen			0	-	0	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo
					Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh pada tahun ke-N	Dokumen			1	90.000.000	1	70.876.213	1	26.046.909	1	26.596.536	1	27.058.390	1	27.058.390	1	27.058.390	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi pada tahun ke-N	Dokumen	11,32	12,32	13,32	18.185.000.000	13,40	13.670.501.592	13,50	13.771.738.975	14	13.881.420.369	14,4	13.965.362.464	14,4	13.965.362.464	14,4	13.965.362.464	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo
					Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya sampai dengan tahun ke-n	Ha	1	1	0	-	1	245.343.400	0	-	0	-	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo
					Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh pada tahun ke-N	Dokumen			130	18.050.000.000	135	12.330.312.927	140	12.676.680.340	145	12.786.545.158	150	12.469.915.183	700	68.313.453.608	1	68.313.453.608	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Per	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani sampai dengan tahun ke-N	unit rumah	0	0	1	135.000.000	1	94.845.265	1	95.058.635	1	94.875.211	1	95.447.281	1	95.447.281	1	95.447.281	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang	Kab. Wonosobo

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub kegiatan (Output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	BASE LINE		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
									2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
					emajaan Permukiman Kumuh																			Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan permukiman kumuh yang tertangani	Jumlah rumah tidak layak huni yang berada diluar SK kawasan kumuh yang ditangani/jumlah total rumah tidak layak huni yang berada diluar SK kawasan kumuh x 100	%	2,93	5,05	12,72	5.290.000.000	20,20	4.303.318.117	27,48	4.312.347.940	34,56	4.341.423.224	41,44	4.365.855.339	41,44	4.365.855.339	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	
				Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani diluar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah RTLH yang tertangani diluar Kawasan Permukiman Kumuh (kumulatif)	unit	150	97	41	5.290.000.000	50	4.303.318.117	55	4.312.347.940	60	4.341.423.224	70	4.365.855.339	277	22.612.944.620	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki sampai dengan tahun N	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki sampai dengan tahun N	unit rumah	151	97	42	5.290.000.000	50	4.303.318.117	55	4.312.347.940	60	4.341.423.224	70	4.365.855.339	277	22.612.944.620	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	Jumlah perumahan yang dibangun pengembang yang telah dilengkapi PSU/ jumlah perumahan total x 100	%	56,67	63,33	73	15.405.000.000	80	12.006.685.367	87	12.032.928.640	93	12.117.429.815	100,00	12.188.436.597	100,00	12.188.436.597	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	
						Persentase satuan permukiman yang memiliki jalan lingkungan dan drainase kondisi baik	Jumlah satuan permukiman (RT/RW) yang memiliki jalan lingkungan dan	%	N/ A	30	40		50		60		70		80		80		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan	Kab. Wonosobo	

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome/Output), Sub kegiatan (Output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	BASE LINE		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
									2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp. (000)			
											Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
							drainase kondisi baik / jumlah satuan permukiman x 100																	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah lokasi yang disediakan PSU	Jumlah lokasi yang disediakan PSU	lokasi	0	56,67	31	15.405.000.000	32	12.001.285.367	33	12.032.928.640	33	12.117.429.815	34	12.188.436.597	34	12.188.436.597	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	
				Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan pada tahun ke-N	Dokumen	0	0	0	-	0	-	2	500.000.000	0	-	0	-	2	-	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian sampai dengan tahun ke-N	Lokasi	75	78	80	15.405.000.000	83	12.001.285.367	84	11.532.928.640	85	12.117.429.815	86	12.118.436.597	418	63.175.080.419	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	
				Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang		Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan pada tahun ke-N	Dokumen	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	30.000.000	1	30.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	
				Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman		Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan permukiman kumuh yang tertangani	Jumlah rumah tidak layak huni yang berada diluar SK kawasan kumuh yang ditangani/jumlah total rumah tidak layak huni yang berada diluar	%	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	40.000.000	1	40.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome Intermediet/Output), Sub kegiatan (Output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	BASE LINE		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
									2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
							SK kawasan kumuh x 100																		
					Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan pada tahun ke-N	Laporan	56,67	63,33	73	15.405.000.000	80	12.006.685.367	87	12.032.928.640	93	12.117.429.815	100,00	12.188.436.597	100,00	12.188.436.597	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase pengembang perumahan kualifikasi kecil yang bersertifikasi	Jumlah pengembang perumahan kualifikasi kecil yang bersertifikasi/jumlah pengembang kualifikasi kecil x 100	%	N/ A	10,00	15,00	-	20,00	25.000.000	25,00	25.052.458	50,00	25.221.371	100,00	25.363.309	100,00	25.363.309	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo		
				Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah Pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Jumlah Pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum	kegiatan	0	0	0	-	1	25.000.000	1	25.052.458	1	25.221.371	1	25.363.309	1	25.363.309	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	Dokumen	0	0	0	-	1	25.000.000	1	25.052.458	1	25.221.371	1	25.363.309	1	25.363.309	Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Kab. Wonosobo		

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome/Output), Sub kegiatan (Output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	BASE LINE		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
									2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp. (000)				
											Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN NON PELAYANAN DASAR																										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																										
2	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel					Nilai SAKIP	Rata-rata nilai komposit dari 5 komponen yaitu : 1). perencanaan kinerja, 2). Pengukuran kinerja, 3). Pelaporan kinerja, 4). Evaluasi internal dan 5). Capaian kinerja.	Angka	63,34	64,5	65,76			66,42		68,64		70,64		72,47		72,47		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Kab. Wonosobo	
		Penatagunaan tanah yang optimal				Persentase penggunaan tanah yang digunakan sesuai peruntukannya	Jumlah penggunaan yang digunakan sesuai peruntukannya /jumlah total luas tanah pemerintah daerah	%	100	100	100			100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Kab. Wonosobo	
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (selesai dan/atau masuk ranah hukum)	%	0,00	100,00	100	30.000.000	24.404.451	100	24.455.655	100	24.620.548	100	24.759.104	100	24.759.104	100,00	24.759.104		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Kab. Wonosobo
				Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah penanganan sengketa tanah garapan pemerintah daerah yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah penanganan sengketa tanah garapan pemerintah daerah yang dilakukan melalui mediasi (selesai dan/atau	angka	0,00	4,00	4	30.000.000	24.404.451	4	24.455.655	4	26.620.548	4	26.759.104	4,00	26.759.104		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Kab. Wonosobo		

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome/Output), Sub kegiatan (Output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	BASE LINE		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
									2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
							masuk ranah hukum)																		
					Inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Doku men	0,00	0,00	0	-	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1,00	12.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Kab. Wonosobo	
					Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota pada tahun ke-N	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	N/A	N/A	1	30.000.000	1	12.404.451	1	12.455.655	1	14.620.548	1	14.759.104	1,00	14.759.104	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Kab. Wonosobo	
			PROGRAM PENATAGU NAAN TANAH			Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum/jumlah penetapan tanah x 100	%	100,00	100,00	0	-	100	100.000.000	100	100.209.884	100	100.885.482	100	101.453.232	100,00	101.453.232	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Kab. Wonosobo	
				Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah penetapan tanah pemerintah daerah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah pemerintah daerah untuk pembangunan fasilitas umum	dokumen	N/ A	N /A	0	-	2	100.000.000	2	100.209.884	2	100.885.482	2	101.453.232	2,00	101.453.232	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Kab. Wonosobo	
					Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya sampai tahun ke-N	dokumen	0,00	3,00	0	-	2	100.000.000	1	100.209.884	1	100.885.482	1	101.453.232	5,00	101.453.232	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Kab. Wonosobo	

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome/Output), Sub kegiatan (Output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	BASE LINE		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
									2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																									
3	Meningkatkan keselamatan lalu lintas					Indeks keselamatan lalu lintas	Indeks komposit mengukur keselamatan lalu lintas jalan kabupaten dengan menghitung persentase fasilitas perlengkapan jalan + layanan angkutan darat + sarana transportasi + titik kemacetan + manajemen + rekayasa lalu lintas + layanan uji berkala kendaraan / 7	%	61,61	64,28	66,81		69,43		72		73,72		75,15		75,15			Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo
		Meningkatnya indeks keselamatan lalu lintas				Indeks keselamatan lalu lintas	Indeks komposit mengukur keselamatan lalu lintas jalan kabupaten dengan menghitung persentase fasilitas perlengkapan jalan + layanan angkutan darat + sarana transportasi + titik kemacetan + manajemen + rekayasa lalu lintas + layanan uji berkala kendaraan / 7	%	61,61	64,28	66,81		69,43		72		73,72		75,15		75,15			Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			Persentase ruas jalan kabupaten yang dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan	Jumlah ruas jalan kabupaten yang terpasang fasilitas perlengkapan jalan (rambu, RPPJ, marka, guard rail, LPJU, APILL, delineator, cermin tikung,	%	47,1	48,84	51,9	6.095.900.000	69,43	4.958.903.007	72	4.969.308.470	73,72	5.002.813.201	75,15	5.030.967.403	75,15	5.030.967.408		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome Intermediet/Output), Sub kegiatan (Output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	BASE LINE		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
									2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
							ATCS)/ jumlah ruas jalan kabupaten																		
						Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten/jumlah kebutuhan perlengkapan jalan x 100	%	89,91	90,26	90,60		91,28		91,62		91,97		92,31		92,31			Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo
						Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten/jumlah kebutuhan perlengkapan jalan x 100	%	37,50	43,75	45,30		50,25		55,50		58,75		75,00		75,00			Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo
						Persentase terminal tipe C kondisi baik dan berfungsi optimal	Jumlah terminal tipe c kondisi baik dan optimal/jumlah terminal tipe C x 100	%	74,7	75,62	77,80		82,30		86,78		90,40		100		100			Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo
						Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan uji berkala kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan melakukan uji kir berkala /jumlah kendaraan wajib uji kir x 100	%	11,43	14,29	17,14		20,00		25,71		28,57		42,86		42,86			Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo
						Persentase parkir tepi jalan umum yang tertata	Jumlah titik parkir tepi jalan umum yang tertata dan atau memiliki kantong parkir/ jumlah titik parkir legal x 100	%	0,00	0,00	-		3		6		9		9		9			Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo
						Persentase tersedianya fasilitas parkir sistem elektronik	Jumlah fasilitas parkir yang menerapkan sistem elektronik/total fasilitas parkir tersedia x 100	%	46,94	50,00	50		50		50		50		50		50			Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome/Output), Sub kegiatan (Output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	BASE LINE		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026					
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
						Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi	Jumlah layanan angkutan darat yang layak fungsi/ jumlah layanan angkutan darat yang tersedia x 100	%	42,27	50,00	55		60		65		67		68		68		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo
						Persentase sarana transportasi yang memenuhi standar keselamatan	total sarana transportasi yang memenuhi standar keselamatan/total kendaraan yang beroperasi di tahun N x 100	%	57,14	57,62	58		59		59		59		60		60		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo
						Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia / jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan x 100	%	57,14	57,62	58,09		58,53		58,96		59,39		59,82		59,82		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo
						Persentase pelaksanaan pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun / jumlah kendaraan wajib uji x100	%	0,80	0,75	0,70		0,60		0,50		0,40		0,30		0,30		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo
						V/C Rasio pada jalan kabupaten	Perbandingan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan	angka	37,50	43,75	45,30		50,25		55,50		58,75		75,00		75,00		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub kegiatan (Output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	BASE LINE		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
									2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026							
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
				Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota		Jumlah dokumen rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			0	0	3	10.000.000	0	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen penetapan kebijakan dan sosialisasi RLLLAJ Kabupaten/Kota		dokumen	0	0	3	10.000.000	0	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo
				Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota		Jumlah ruas jalan kabupaten yang terpasang fasilitas perlengkapan jalan	Jumlah ruas jalan kabupaten yang terpasang fasilitas perlengkapan jalan (rambu, RPPJ, marka, guard rail, LPJU, APILL, delineator, cermin tikung, ATCS)	ruas	20	21	22	4.310.000.000	23	2.821.251.826	24	2.856.473.650	25	2.858.974.185	26	2.874.220.235	167	2.874.220.235	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo		
				Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota		Jumlah ruas jalan yang dilengkapi perlengkapan jalan		ruas	184	196	205	3.635.000.000	208	2.276.765.183	210	2.346.518.527	212	2.347.068.492	215	2.347.530.346	1.050	12.952.882.548	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo		
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		Jumlah ruas jalan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan		ruas			100	675.000.000	80	544.486.643	75	509.955.123	75	511.905.693	75	526.689.889	75	526.689.889	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo		
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah terminal tipe C yang dikelola	Jumlah terminal tipe c yang dikelola	lokasi	2	2	2	120.900.000	3	347.000.000	3	310.000.000	3	314.000.000	3	321.000.000	3	321.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo		
				Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		Jumlah terminal tipe C yang dikembangkan		lokasi	1	0	1	23.900.000	2	240.000.000	2	235.000.000	2	234.000.000	2	240.000.000	2	240.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo		

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome Intermediet/Output), Sub kegiatan (Output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	BASE LINE		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026					
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe C yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan		lokasi	1	1	2	97.000.000	2	107.000.000	2	75.000.000	2	80.000.000	2	81.000.000	2	81.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang dikeluarkan	Jumlah izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang dikeluarkan	lokasi	30	35	36	110.000.000	37	89.482.985	38	89.670.751	39	90.275.341	40	90.783.381	42,86	90.783.381	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo	
					Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin Penyelenggaraan Parkir yang dikeluarkan	Dokumen			0	-			0	-	1	40.000.000	0	-	0	-	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan izin penyelenggaraan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/ Kota	dokumen			1	110.000.000	1	89.482.985	1	89.670.751	1	50.275.341	1	90.783.381	1	90.783.381	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo	
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji yang melaksanakan uji berkala	Jumlah kendaraan wajib uji yang melaksanakan uji berkala	unit	8000	8500	9000	225.000.000	9100	483.033.379	9200	483.417.445	9300	494.654.107	9400	485.693.280	9400	485.693.280	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo	
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian	Jumlah sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	angka	0	0	0	-	3	320.000.000	3	310.000.000	3	310.000.000	3	310.000.000	12	1.250.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Kab. Wonosobo	

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome/Output), Sub kegiatan (Output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	BASE LINE		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026					
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					Berkala Kendaraan Bermotor																		Pemerintahan Bidang Perhubungan	
					Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan		angka			1000	25.000.000	5000	20.337.042	5100	20.379.716	5200	20.517.123	5300	20.632.587	5300	20.632.587	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara		angka			12	200.000.000	12	142.696.337	12	153.037.729	12	164.136.984	12	155.060.693	12	155.060.693	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	angka		250	252	860.000.000	254	760.000.000	256	691.594.738	258	736.702.719	260	751.017.472	260	751.017.472	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo
					Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		dokumen			12	460.000.000	12	460.000.000	12	440.965.236	12	434.073.217	12	446.684.870	12	446.684.870	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo
					Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Forum LLAJ		dokumen		12	12	400.000.000	12	300.000.000	12	250.629.502	12	302.629.502	12	304.332.602	12	304.332.602	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen andalalin yang disetujui	Jumlah dokumen andalalin yang disetujui	dokumen	25	40	100	10.000.000	110	8.134.817	115	28.151.886	120	28.206.849	125	28.253.035	125	28.253.035	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo
					Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah personil yang melaksanakan diklat penilai Andalalin		angka	0	1	0	-	0	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan	Kab. Wonosobo

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome/Output), Sub kegiatan (Output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	BASE LINE		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
									2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026								
											Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
																								Bidang Perhubungan			
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalan	Jumlah dokumen yang dinilai		angka	0	0	100	-	110	4.000.000	115	10.000.000	120	10.000.000	125	10.000.000	125	10.000.000	125	10.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo	
					Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalan	Jumlah rekomendasi andalan yang dilakukan pengawasan		angka	0	0	100	10.000.000	110	4.134.817	115	8.151.886	120	8.206.849	125	8.253.035	125	8.253.035	125	8.253.035	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Jumlah Ruas Jalan yang di Audit atau di Inspeksi	Jumlah Ruas Jalan yang di Audit (kumulatif)	%	1	1	2	225.000.000	3	225.000.000	4	225.000.000	5	225.000.000	6	225.000.000	6	225.000.000	6	225.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo	
					Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C		Dokumen	0	0	12	225.000.000	12	245.000.000	12	225.000.000	12	225.000.000	12	225.000.000	12	225.000.000	12	225.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo	
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah ruas jalan yang dilalui trayek angkutan umum	Jumlah ruas jalan yang dilalui trayek angkutan umum	ruas	36	36	0	-	0	-	12	50.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	41,00	20.000.000	20.000.000	41,00	20.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Trayek Angkutan Umum yang disediakan		unit	0	0	0	-	0	-	20	50.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo	

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub kegiatan (Output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	BASE LINE		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026					
											Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					Kabupaten/Kota																			
		Meningkatnya konektivitas wilayah				Rasio Konektivitas Wilayah	(IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan), dengan IK berupa kinerja jumlah trayek terhadap kebutuhan	%	92,5	93,00	93,50		94,50		95,00		96,50		97,00		97,00		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			Persentase dermaga penyeberangan waduk dalam kondisi baik	Jumlah dermaga kondisi baik/jumlah dermaga total x 100	%	0,00	0,00	0,00	-	25,00	20.000.000	30,00	20.041.967	35,00	20.177.096	50,00	20.290.647	50,00	20.290.647	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo
				Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha		Jumlah ijin usaha yang diterbitkan	Jumlah ijin usaha yang diterbitkan	angka			0	-	1	20.000.000	0	-	0	-	0	-	-	-	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan			0	-	1	20.000.000	0	-	0	-	0	-	-	-	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome Intermediet/Output), Sub kegiatan (Output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	BASE LINE		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
									2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026							
											Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
							a pada tahun ke-N																			
				Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Izin yang dikeluarkan	Jumlah Izin yang dikeluarkan	angka	0	21	20	20.000.000	0	-	20	10.041.967	20	5.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik pada tahun ke-N	Dokumen	0	31	20	20.000.000	0	-	20	10.041.967	20	5.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo
				Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		Jumlah dermaga dalam kondisi baik	jumlah dermaga dalam kondisi baik	lokasi	0,00	0,00	0,00	-	0	-	1	10.000.000	1	15.177.096	1	10.290.647	1	10.290.647	1	10.290.647	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	0	-	2	5.000.000	2	10.000.000	2	5.290.647	2	5.290.647	2	5.290.647	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome/Output), Sub kegiatan (Output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	BASE LINE		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
									2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
							pada tahun ke-N																		
					Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara pada tahun ke-N	Unit	0,00	0,00	0,00	-	0	-	2	5.000.000	2	5.177.096	2	5.000.000	2	5.000.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo
5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik					Nilai ketercapaian SPM layanan dasar	(Jumlah nilai ketercapaian SPM urusan layanan dasar/jumlah urusan layanan dasar) x 100	%	90	100	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo	
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor hasil survei pelayanan publik. Indeks ini menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik	%	81,81	82	82,5		83		83,5		84,0		84,5		84,5		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo	
		Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel				Nilai SAKIP	Rata-rata nilai komposit dari 5 komponen yaitu : 1). perencanaan kinerja, 2). Pengukuran kinerja, 3). Pelaporan kinerja, 4). Evaluasi internal dan 5). Capaian kinerja.	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan sesuai urusan	Kab. Wonosobo	
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor Rata-rata hasil survey	%	81,81	82	82,5		83		83,5		84		84,5		84,5		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan PERKIMHUB	Kab. Wonosobo	

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome Intermediet/Output), Sub kegiatan (Output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	BASE LINE		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026					
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase Aset Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik	Jumlah Aset Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik / Jumlah Aset Perangkat Daerah X 100	%	100	100	100	5.824.447.160	100	7.177.009.734	100	7.052.522.772	100	7.329.546.071	100	7.422.429.278	100	7.422.429.278	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan PERKIMHUB	Kab. Wonosobo
						Persentase Pemenuhan Sarpras Pendukung Kinerja	Jumlah Sarpras Pendukung Kinerja yang terpenuhi / Jumlah Kebutuhan Sarpras Pendukung Kinerja X 100	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan PERKIMHUB	Kab. Wonosobo
						Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran / Jumlah Pelayanan Perkantoran X 100	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan PERKIMHUB	Kab. Wonosobo
						Persentase keselarasan program renja perangkat daerah dengan RKPD	Jumlah Program Renja PD yang selaras dengan program RKPD/Jumlah Program RKPD sesuai urusan X 100	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan PERKIMHUB	Kab. Wonosobo
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	(Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan nama OPD yang disusun tepat waktu/jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan nama OPD yang seharusnya disusun)x100%	%	100	100	100	30.000.000	100	30.000.000	100	35.640.760	100	35.670.980	100	35.000.960	100	35.000.960	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan sesuai urusan	Kab. Wonosobo
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Cakupan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen (Renja, Renkasi, PK, LKJIP)	4	4	4	30.000.000	4	30.000.000	4	35.640.760	4	35.670.980	4	35.000.960	4	35.000.960	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan	Kab. Wonosobo

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub kegiatan (Output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	BASE LINE		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
									2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp. (000)				
											Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
																									sesuaikan urusan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	(Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu/Jumlah administrasi keuangan yang harus dilaporkan)x 100%	Dokumen (Laporan Keu. Semesteran)	2	2	2	4.413.504.800	2	5.142.352.035	2	5.124.115.555	2	5.138.150.730	2	5.159.389.750	2	5.159.389.750			Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan sesuaikan urusan	Kab. Wonosobo
								Dokumen (Lap. Keu. Audited)	1	1	1		1		1		1		1		1					
								Dokumen (Lap. Keu. Bulanan)	12	12	12		12		12		12		12		12					
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Cakupan Layanan gaji dan tunjangan ASN		Orang / bulan	43 x 14 bulan	43 x 14 bulan	43 x 14 bulan	4.413.504.800	43 x 14 bulan	5.142.352.035	43 x 14 bulan	5.124.115.555	43 x 14 bulan	5.138.150.730	43 x 14 bulan	5.159.389.750	43 x 14 bulan	5.159.389.750			Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan sesuaikan urusan	Kab. Wonosobo
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi/ jumlah pelayanan kepegawaian) x 100	%	-	-	-	-	100	91.101.310	100	22.340.321	100	102.321.223	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan sesuaikan urusan	Kab. Wonosobo
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		alat	-	-	-	-	50	20.550.760	50	22.340.321	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan sesuaikan urusan	Kab. Wonosobo	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut		Cakupan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Set pakaian dinas	-	-	100	373.871.360	100	516.311.919	100	475.799.866	100	537.123.007	100	643.373.847	100	643.373.847			Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan	Kab. Wonosobo

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub kegiatan (Output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	BASE LINE		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
									2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp. (000)				
											Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
					Kelengkapannya																				sesuaikan urusan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	(Jumlah realisasi belanja administrasi umum / jumlah anggaran belanja administrasi umum) x 100%	%	100	100	100	373.871.360	100	516.311.919	100	475.799.866	100	537.123.007	100	643.373.847	100	643.373.847	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan sesuai urusan	Kab. Wonosobo		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Cakupan Layanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		titik	2	2	2	85.000.000	2	100.000.000	2	120.320.231	2	125.330.430	2	130.280.907	2	130.280.907	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan sesuai urusan	Kab. Wonosobo		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Cakupan Layanan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jenis	80	80	80	85.500.860	83	100.000.000	82	98.765.434	90	115.468.907	100	150.890.754	100	150.890.754	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan sesuai urusan	Kab. Wonosobo		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Cakupan Bahan Logistik Kantor		Jenis (dekorasi)	20	20	20	20.000.000	25	48.887.330	25	23.343.231	30	25.222.780	40	35.467.875	40	35.467.875	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan sesuai urusan	Kab. Wonosobo		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Cakupan Layanan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jenis (ATK Kantor)	100	100	100	44.778.500	100	51.323.456	100	50.980.765	100	52.342.132	100	55.432.341	100	55.432.341	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan sesuai urusan	Kab. Wonosobo		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Cakupan Layanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Eksemplar	2 x 12	2 x 12	2 x 12	2.700.000	2 x 12	3.576.090	2 x 12	3.098.786	2 x 12	2.890.765	2 x 12	3.560.908	2 x 12	3.560.908	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan sesuai urusan	Kab. Wonosobo		
12				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Cakupan pelayanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		bulan	12	12	12	135.892.000	12	212.525.043	12	179.291.419	12	215.867.993	12	267.741.062	12	267.741.062	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan	Kab. Wonosobo		

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub kegiatan (Output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	BASE LINE		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
									2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026							
											Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
																									sesuaikan urusan	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(Jumlah Pengadaan Barang yang terealisasi/ Jumlah Rencana Pengadaan Barang) X 100	%	100	100	100	75.000.000	12	231.574.445	12	89.218.969	12	241.442.866	12	150.980.790	12	150.980.790	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan sesuai urusan	Kab. Wonosobo		
				Pengadaan Mebel		Jumlah Pengadaan Mebel		unit	100	100	100	-	100	50.350.450	100	-	100	50.987.990	100	-	100	-	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan sesuai urusan	Kab. Wonosobo		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		unit	-	-	10	75.000.000	15	111.223.995	10	89.218.969	11	90.454.876	11	90.980.790	10	75.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan sesuai urusan	Kab. Wonosobo		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Unit bangunan	-	-	-	-	1	70.000.000	-	-	1	100.000.000	1	60.000.000	-	-				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Jumlah anggaran belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah X 100	%	100	100	100	615.500.000	100	714.071.725	100	754.655.842	100	768.610.745	100	774.208.242	100	615.500.000	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan sesuai urusan	Kab. Wonosobo		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Cakupan Pelayanan Jasa Surat Menyurat		Materi & paket pengiriman	225	225	225	2.500.000	225	2.750.000	225	3.209.804	225	3.908.765	225	4.245.309	225	2.500.000	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan	Kab. Wonosobo		

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub kegiatan (Output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	BASE LINE		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
									2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
											Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
																								sesuaikan urusan	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Unit / tahun	4	4	4	64.000.000	4	65.500.750	4	67.890.799	4	70.908.760	4	69.054.033	4	64.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan disesuaikan urusan	Kab. Wonosobo	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Orang bulan	23	25	25	549.000.000	25	645.820.975	25	683.555.239	25	693.793.220	25	700.908.900	25	549.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan disesuaikan urusan	Kab. Wonosobo	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Jumlah anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah X 100	%	100	100	100	316.571.000	100	451.598.300	100	550.751.459	100	506.226.520	100	659.475.689	100	316.571.000	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan disesuaikan urusan	Kab. Wonosobo	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Unit kendaraan	32	32	32	236.571.000	32	250.456.780	32	270.897.890	32	280.908.765	32	302.456.789	32	302.456.789	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan disesuaikan urusan	Kab. Wonosobo	
					Pemeliharaan Mebel	Cakupan Layanan Penyediaan Pemeliharaan Mebel		unit	25	25	25	5.000.000	25	15.340.980	25	13.231.890	25	13.908.765	25	20.321.455	100	20.321.455	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan disesuaikan urusan	Kab. Wonosobo	

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome/Output), Sub kegiatan (Output)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	BASE LINE		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026					
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Unit	25	25	25	25.000.000	25	35.249.870	25	40.980.789	25	30.421.340	25	33.241.555	100	33.241.555	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan sesuaikan urusan	Kab. Wonosobo
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Unit gedung	2	2	2	50.000.000	2	150.550.670	2	225.640.890	2	180.987.650	2	303.455.890	100	303.455.890	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan sesuaikan urusan	Kab. Wonosobo

BAB VII

INDIKATOR KINERJA DINAS PERKIMHUB YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

7.1. Indikator Kinerja Dinas Perkimhub yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkimhub Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 dengan Tujuan dan Sasaran yang sudah dirumuskan merupakan dasar penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Kebijakan program dan kegiatan dapat diukur dari hasil dari program dan keluaran kegiatan.

Dengan demikian, untuk mengevaluasi dampak kebijakan berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan, diperlukan beberapa indikator yang secara kuantitatif maupun kualitatif terukur. Sebelum menentukan indikator makro yang akan digunakan, terlebih dahulu perlu ditetapkan bahwa indikator-indikator tersebut memenuhi syarat kaidah pengukuran indikator yang "**SMART**" yaitu :

1. **Spesifik**; dalam arti bahwa indikator digunakan harus terarah menunjukkan perkembangan yang dapat diukur keberhasilannya;
2. **Terukur**; indikator yang akan digunakan dapat dengan mudah diukur;
3. **Terjangkau**; Indikator yang digunakan bersifat mudah dan tidak rumit dalam perhitungan; kemudahan mendapatkan data dari sumber yang jelas dan resmi juga diperhatikan;
4. **Realistis**; Indikator yang digunakan merupakan indikator yang logis dalam hal cara mengukur kondisi dan perubahan yang ingin dicapai;
5. **Masa Waktu**; Indikator pengukur yang digunakan memiliki masa waktu pengukuran tertentu dan dapat dilakukan secara rutin/tahunan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perkimhub Kabupaten Wonosobo harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Table 11.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nilai SAKIP	Skor atas penilaian akuntabilitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan	Rata-rata nilai komposit dari 5 komponen yaitu : 1). Perencanaan kinerja, 2). Pengukuran kinerja, 3). Pelaporan kinerja, 4). Evaluasi internal 5). Capaian kinerja.	Angka	63,30	64,50	65,76	66,42	68,64	70,64	72,47	72,47
Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor hasil survei Pelayanan publik yang menggambarkan persepsi penerima Pelayanan terhadap Pelayanan publik yang diselenggarakan.	Skor rata rata hasil survey	Angka	81,81	82,46	84,50	85,54	86,57	87,61	88,21	88,21
Indeks Keselamatan Jalan	Indeks komposit mengukur keselamatan lalu lintas jalan kabupaten dengan	Indeks Kesjal = Σ (capaian kinerja)	Angka	61,61	64,23	66,81	69,43	72,00	73,72	75,15	75,15

Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pendekatan aspek fasilitas perlengkapan jalan, layanan angkutan darat, sarana transportasi, titik kemacetan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, layanan uji berkala kendaraan	Perlengkapan jalan + layanan angkutan darat+kinerja sarana transportasi + kemacetan yang tertangani + manajemen rekayasa + terminal penumpang tipe c + pelaksanaan uji berkala kendaraan)/7									
Presentase Permukiman Layak Huni	Luas permukiman layak huni terhadap luas permukiman total	Luas permukiman layak huni terhadap luas permukiman total	%	68,40	69,50	70,60	71,70	72,80	73,90	75,00	75,00
Rasio Konektivitas Wilayah	(IK1 * bobot angkutan jalan) + (IK2 * Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan), dengan IK berupa kinerja Jumlah	RK= (IK1 * bobot angkutan jalan) + (IK2 * Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan), dengan IK berupa kinerja	Angka	92,50	93,00	93,50	94,50	95,00	96,50	97,00	97,00

Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	trayek Terhadap kebutuhan	Jumlah trayek terhadap kebutuhan									

Table 12.
Indikator Program Kerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Program	Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR												
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani pada tahun N+ Tahun (N-1)/ jumlah total rumah tidak layak huni di Kabupaten Wonosobo x 100	Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani pada tahun N+ Tahun (N-1)/ jumlah total rumah tidak layak huni di Kabupaten Wonosobo x 100	%	19,25	21,45	29,41	37,37	45,33	53,29	61,25	61,25
	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah rumah terkena bencana yang ditangani/jumlah rumah yang direncanakan untuk ditangani x 100	Jumlah rumah terkena bencana yang ditangani/jumlah rumah yang direncanakan untuk ditangani x 100	%	20,00	21,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase rumah tangga yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi	Jumlah rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan bangunan atau bangunan +rumah tangga penerima subsidi uang sewa+ rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni atau	Jumlah rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan +rumah tangga penerima subsidi uang sewa+ rumah tangga penerima penyediaan rumah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Program	Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	penyediaan rumah yang layak huni	relokasi jumlah rumah tangga yang direncanakan menerima relokasi x 100	layak huni atau relokasi jumlah rumah tangga yang direncanakan menerima relokasi x 100									
Program Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di kabupaten yang ditangani	Luas permukiman kumuh yang ditangani/luas permukiman kumuh total x 100	Luas permukiman kumuh yang ditangani/luas permukiman kumuh total x 100	%	6,19	16,69	33,39	44,52	55,65	72,34	100,00	100,00
	Persentase penetapan kebijakan rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh sampai dinyatakan sah (legal)	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun/jumlah satu dokumen RP3KPKP lengkap dan sudah disahkan x 100	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun/jumlah satu dokumen RP3KPKP lengkap dan sudah disahkan x 100	%	0,00	0,00	10,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program Perumahan dan Kawasan	Persentase rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang berada diluar SK kawasan	Jumlah rumah tidak layak huni yang berada diluar SK	%	2,93	5,05	12,72	20,20	27,48	34,56	41,44	41,44

Program	Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Permukiman Kumuh	diluar kawasan permukiman kumuh yang tertangani	kumuh yang ditangani/jumlah total rumah tidak layak huni yang berada diluar SK kawasan kumuh x 100	kawasan kumuh yang ditangani/jumlah total rumah tidak layak huni yang berada diluar SK kawasan kumuh x 100									
Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	Jumlah perumahan yang dibangun pengembang yang telah dilengkapi PSU/ jumlah perumahan total x 100	Jumlah perumahan yang dibangun pengembang yang telah dilengkapi PSU/ jumlah perumahan total x 100	%	56,67	63,33	73,33	80,00	86,67	93,33	100,00	100,00
	Persentase satuan permukiman yang memiliki jalan lingkungan dan drainase kondisi baik	Jumlah satuan permukiman (RW/RT) yang memiliki jalan lingkungan dan drainase kondisi baik/jumlah satuan permukiman x 100	Jumlah satuan permukiman (RW/RT) yang memiliki jalan lingkungan dan drainase kondisi baik/jumlah satuan permukiman x 100	%	N/ A	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang	Persentase pengembang perumahan kualifikasi kecil yang bersertifikasi	Jumlah pengembang perumahan kualifikasi kecil yang bersertifikas/jumlah pengembang kualifikasi kecil x 100	Jumlah pengembang perumahan kualifikasi kecil yang bersertifikas/jumlah pengembang kualifikasi kecil x 100	%	N/ A	10,00	15,00	20,00	25,00	50,00	100,00	100,00

Program	Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Perumahan dan Kawasan Permukiman												
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR												
URUSAN PERTANAHAN												
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi/ jumlah penanganan sengketa tanah garapan x 100	Jumlah penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi/ jumlah penanganan sengketa tanah garapan x 100	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program Penatagunaan Tanah	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum/ jumlah penetapan tanah x 100	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum/ jumlah penetapan tanah x 100	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN PERHUBUNGAN												
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ruas jalan kabupaten yang dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan	Jumlah ruas jalan kabupaten yang terpasang fasilitas perlengkapan jalan (rambu, RPPJ, marka, guard rail, LPJU, APILL, delineator, cermin tikung, ATCS)/ jumlah ruas jalan kabupaten x 100	Jumlah ruas jalan kabupaten yang terpasang fasilitas perlengkapan jalan (rambu, RPPJ, marka, guard rail, LPJU, APILL, delineator, cermin tikung, ATCS)/ jumlah ruas jalan kabupaten x 100	%	47,10	48,84	51,90	53,33	55,58	57,83	60,07	60,07

Program	Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten/jumlah kebutuhan perlengkapan jalan x 100	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten/jumlah kebutuhan perlengkapan jalan x 100	%	89,91	90,26	90,60	91,28	91,62	91,97	92,31	92,31
	Persentase terminal tipe C kondisi baik dan berfungsi optimal	Jumlah terminal tipe c kondisi baik dan optimal/jumlah terminal tipe C x 100	Jumlah terminal tipe c kondisi baik dan optimal/jumlah terminal tipe C x 100	%	37,50	43,75	45,30	50,25	55,50	58,75	75,00	75,00
	Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan uji berkala kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan melakukan uji kir berkala /jumlah kendaraan wajib uji kir x 100	Jumlah kendaraan melakukan uji kir berkala /jumlah kendaraan wajib uji kir x 100	%	74,70	75,62	77,80	82,30	86,78	90,40	100,00	100,00
	Persentase parkir tepi jalan umum yang tertata	Jumlah titik parkir tepi jalan umum yang tertata dan atau memiliki kantong parkir/ jumlah titik parkir legal x 100	Jumlah titik parkir tepi jalan umum yang tertata dan atau memiliki kantong parkir/ jumlah titik parkir legal x 100	%	11,43	14,29	17,14	20,00	25,71	28,57	42,86	42,86
	Persentase tersedianya fasilitas parkir sistem elektronik	Jumlah fasilitas parkir yang menerapkan sistem elektronik/total fasilitas parkir tersedia x 100	Jumlah fasilitas parkir yang menerapkan sistem elektronik/total	%	0,00	0,00	0,00	2,85	5,71	8,57	8,57	8,57

Program	Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			fasilitas parkir tersedia x 100									
	Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi	Jumlah layanan angkutan darat yang layak fungsi/ jumlah layanan angkutan darat yang tersedia x 100	Jumlah layanan angkutan darat yang layak fungsi/ jumlah layanan angkutan darat yang tersedia x 100	%	46,94	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Persentase sarana transportasi yang memenuhi standar keselamatan	total sarana transportasi yang memenuhi standar keselamatan/total kendaraan yang beroperasi di tahun N x 100	total sarana transportasi yang memenuhi standar keselamatan/total kendaraan yang beroperasi di tahun N x 100	%	42,27	50,00	55,00	60,00	65,00	67,00	68,00	68,00
	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia / jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan x 100	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia / jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan x 100	%	57,14	57,62	58,09	58,53	58,96	59,39	59,82	59,82
	Persentase pelaksanaan	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun / jumlah	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun /	%	47,87	52,87	57,87	62,87	67,87	72,87	77,87	77,87

Program	Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	pelayanan uji berkala	kendaraan wajib uji x100	jumlah kendaraan wajib uji x100									
	V/C Rasio pada jalan kabupaten	Perbandingan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan	Perbandingan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan	angka	0,80	0,75	0,70	0,60	0,50	0,40	0,30	0,30
Program Pengelolaan Pelayanan	Persentase dermaga penyeberangan waduk dalam kondisi baik	Jumlah dermaga kondisi baik/jumlah dermaga total x 100	Jumlah dermaga kondisi baik/jumlah dermaga total x 100	%	0,00	0,00	0,00	25,00	30,00	35,00	50,00	50,00
NON URUSAN												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	(Jumlah aset perangkat daerah dalam kondisi baik/ jumlah aset perangkat daerah) x 100	(Jumlah aset perangkat daerah dalam kondisi baik/ jumlah aset perangkat daerah) x 100	%	N/ A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	(Jumlah sarpras pendukung kinerja yang terpenuhi/ jumlah kebutuhan sarpras pendukung kinerja) x 100	(Jumlah sarpras pendukung kinerja yang terpenuhi/ jumlah kebutuhan sarpras pendukung kinerja) x 100	%	N/ A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Disperkimhub dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Rencana Strategis Disperkimhub diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi. Rencana Strategis merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi.

Rencana Strategis digunakan sebagai masukan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis Disperkimhub Kabupaten Wonosobo tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2021 - 2026 dan sebagai pelaksanaan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo tahun 2005-2025.

Rencana Strategis Disperkimhub nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Renja dan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis Disperkimhub ditetapkan dengan peraturan pimpinan Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Strategis Disperkimhub mendukung Program Unggulan Bupati Wakil Bupati Wonosobo berupa “**Wonosobo Aman**” yaitu Penataan dan penertiban fasilitas umum, yang dapat diuraikan melalui Penataan dan penertiban parkir dan fasilitas keselamatan jalan lainnya. Program unggulan “**Wonosobo Aman**” diharapkan meningkatkan keamanan dan kenyamanan terutama berinvestasi dan berwisata, serta “**Wonosobo Maer**” dalam bentuk peningkatan jalan kabupaten prioritas pada jalan penghubung simpul pariwisata, simpul produksi/pertanian, desa miskin, kawasan perbatasan/pinggiran dan jalur evakuasi bencana, penataan kota dan/atau ibu kota kecamatan, dan pengembangan kawasan perdesaan prioritas.

Demikian untuk dilaksanakan penuh tanggung jawab dengan seikhlas-ikhlasnya.

LAMPIRAN

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan (Lama)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan (Baru)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan (Output)	Satuan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan (Lama)	Satuan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan (Baru)	Pekerjaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi										
			UR	B/D	PRG	REG	SUBK								2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				Target	Rp. (000)								
																	Target	Target	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					Target	Rp. (000)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25														
URBAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																						
URBAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																																						
1	Menyediakan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni							Perentase Permukiman Layak Huni	Perentase Permukiman Layak Huni	Luas permukiman layak huni terhadap luas permukiman total x 100	%	%		68,4	69,5	70,60		71,70					72,80		73,90		75,00		75,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonorebo							
	Meningkatnya permukiman layak huni							Perentase Permukiman Layak Huni	Perentase Permukiman Layak Huni	Luas permukiman layak huni terhadap luas permukiman total x 100	%	%		68,4	69,5	70,60		71,70					72,80		73,90		75,00		75,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonorebo							
			1	04	02			PROGRAM PENINGKATAN PERUMAHAN	Perentase rumah tidak layak huni yang terangan	Jumlah rumah tidak layak huni yang terangan pada tahun N-1/ jumlah total rumah tidak layak huni di Kabupaten Wonorebo x 100	Jumlah rumah tidak layak huni yang terangan pada tahun N-1/ jumlah total rumah tidak layak huni di Kabupaten Wonorebo x 100%	%	%		19,25	21,45	29,41		842.500.000	37,37		685.358.320	45,33		686.796.435	53,29		691.427.045	61,25		695.318.171	61,25		695.318.171	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonorebo		
								Perentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah rumah terkena bencana yang ditangani/ jumlah rumah yang direncanakan untuk ditangani x 100	%	%		20	21	100		100			100		100		100		100		100,00		100,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonorebo					
								Jumlah rumah tangga yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang menggarah fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah rumah tangga penerima bantuan subsidi uang sewa rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni atau relokasi jumlah rumah tangga yang direncanakan menerima relokasi x 100	Jumlah rumah tangga penerima bantuan subsidi uang sewa rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni atau relokasi jumlah rumah tangga yang direncanakan menerima relokasi x 100	%	%		100	100	100		100			100		100		100		100,00		100,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonorebo							
			1	04	02	201		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data BMDA masyarakat calon penerima bantuan RTM, PK, dan PI Bencana	Jumlah dokumen data BMDA masyarakat calon penerima bantuan RTM, PK, dan PI Bencana	Jumlah dokumen data BMDA masyarakat calon penerima bantuan RTM, PK, dan PI Bencana	dokumen	dokumen	0	0	1		180.000.000	2		150.740.500	2		166.035.822	2		141.986.731	2		142.785.787	2		142.785.787	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonorebo			
			1	04	02	201	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Perumahan di Lokasi Rawan Bencana yang teridentifikasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota pada tahun ke-N	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota pada tahun ke-N	angka	Dokumen	pendataan perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena program relokasi	0	0	0		0		0		0		0		1		10.000.000	0		0		0	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonorebo		
			1	04	02	201	02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Luas lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan yang teridentifikasi	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan sampai tahun ke-N	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan sampai tahun ke-N	angka	Dokumen	pendataan lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	0	0	0		0		0		0		0		1		30.000.000	0		0		0	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonorebo		
			1	04	02	201	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah dokumen persiapan pelaksanaan SPM Bidang Perumahan	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani pada tahun ke-N	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani pada tahun ke-N	dokumen	Dokumen	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	0	0	0		0		0		0		1		10.522.534	1		10.593.480	1		10.653.098	1		10.653.098	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonorebo

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Basaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Lama)	Indikator Kinerja Tujuan/Basaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Baru)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan/Basaran/Program/Kegiatan (Output)	Sasaran Indikator Kinerja Tujuan/Basaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Lama)	Sasaran Indikator Kinerja Tujuan/Basaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Baru)	Peberjaan	BASE LINE										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi								
			UR	B/P/U	P/RC	K/DO	S/MBK								2020		2021		2022		2023		2024						2025		2026					
															Target	Target	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
			1	04	02	201	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah rumah korban bencana yang didata	Jumlah dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah pada tahun ke-N	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah pada tahun ke-N	uit	Dokumen	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	0	0	0	0	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Perangkat Daerah Pengampu Usuan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo			
			1	04	02	201	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pendataan dan verifikasi penerima bantuan PKH, PK, dan PB Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi pada tahun ke-N	dokumen	Dokumen	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	1	180.000.000	1	150.740.500	1	100.513.288	1	121.393.251	1	122.132.689	1	122.132.689	1	122.132.689	1	122.132.689	Perangkat Daerah Pengampu Usuan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo			
			1	04	02	201	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah dokumen pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus pada tahun ke-N	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus pada tahun ke-N	dokumen	Dokumen	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Perangkat Daerah Pengampu Usuan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	
			1	04	02	202		Sosialisasi dan Persiapan Penyelesaian dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sosialisasi penangan rumah	Jumlah dokumen sosialisasi penangan rumah	Jumlah dokumen sosialisasi penangan rumah	dokumen	dokumen	Sosialisasi dan Persiapan Penyelesaian dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	1	4	30.000.000	4	24.404.450	4	24.455.659	4	24.620.548	4	24.759.104	4	24.759.104	4	24.759.104	4	24.759.104	Perangkat Daerah Pengampu Usuan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo		
			1	04	02	202	01	Sosialisasi Standar Teknik Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah dokumen sosialisasi teknis rehabilitasi rumah	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknik Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknik Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota pada tahun ke-N	dokumen	orang	Sosialisasi Standar Teknik Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	0	0	25	24.404.450	25	24.455.659	25	6.461.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Perangkat Daerah Pengampu Usuan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	
			1	04	02	202	06	Koordinasi untuk Menyepakati Perencanaan dan Jenis Pelayanan	Jumlah sosialisasi, workshop, dan rapat yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan pada tahun ke-N	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Pelayanan pada tahun ke-N	angka	Dokumen	Koordinasi untuk Menyepakati Perencanaan dan Jenis Pelayanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Perangkat Daerah Pengampu Usuan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	
			1	04	02	202	04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah dokumen pembentukan tim satgas, tim pendamping dan fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih pada tahun ke-N	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih pada tahun ke-N	dokumen	orang	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	9	9	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Perangkat Daerah Pengampu Usuan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo
			1	04	02	203		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah yang ditangani	Jumlah unit rumah yang ditangani	Jumlah unit rumah yang ditangani	unit	unit	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	N/A	25	25	635.500.000	27	2.490.213.370	29	436.200.038	31	474.377.026	33	477.046.665	33	477.046.665	33	477.046.665	33	477.046.665	Perangkat Daerah Pengampu Usuan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo		
			1	04	02	203	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terrehabilitasi	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terrehabilitasi sampai dengan tahun ke-N	unit	unit rumah	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	10	10	285.500.000	12	2.194.411.556	14	194.819.498	16	146.133.036	18	197.236.809	20	3.018.100.899	22	3.018.100.899	24	3.018.100.899	26	3.018.100.899	Perangkat Daerah Pengampu Usuan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	
			1	04	02	203	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah unit rumah korban bencana yang direlokasi	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun sampai dengan tahun ke-N	unit	unit rumah	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	10	10	330.000.000	9	295.801.814	8	241.380.540	7	228.243.990	9	279.809.836	43	1.395.236.200	43	1.395.236.200	43	1.395.236.200	43	1.395.236.200	Perangkat Daerah Pengampu Usuan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	
			1	04	02	203	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah khusus beserta PSU yang dibangun	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	angka	unit rumah	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Perangkat Daerah Pengampu Usuan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo
			1	04	02	204		Pendidikasan dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan sosialisasi serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan sosialisasi serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan sosialisasi serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	lokasi	lokasi	Pendidikasan dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Perangkat Daerah Pengampu Usuan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Basaran/Program/Kegiatan (Sama)	Indikator Kinerja Tujuan/Basaran/Program/Kegiatan (Berisi)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan/Basaran/Program/Kegiatan (Output)	Satuan Indikator Kinerja Tujuan/Basaran/Program/Kegiatan (Sama)	Satuan Indikator Kinerja Tujuan/Basaran/Program/Kegiatan (Berisi)	Pekerjaan	BASE LINE										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
			2020		2021		2022									2023		2024		2025		2026		Target	Rp. (000)					
			Target	Target	Target	Target	Rp. (000)	Target								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
			04	02	204	01		Pelaksanaan pembagian rumah bagi korban Bencana Kabupaten/ Kota atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah sosialisasi pembagian rumah yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	angka	Laporan	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau yang Terkena Relokasi Program	0	0	0	0	0	1	20.062.950	1	30.265.644	1	30.435.969	1	30.435.969	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	
			04	02	204	02		Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah unit rumah yang diserahkan	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah kepada Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah kepada Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	unit	Dokumen	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau yang Terkena Relokasi Program	0	0	0	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	1	10.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	
			04	02	205			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah bimtek/sosialisasi/pelatihan pengelolaan rumah susun	Jumlah bimtek/sosialisasi/pelatihan pengelolaan rumah susun pada tahun ke-N	Jumlah bimtek/sosialisasi/pelatihan pengelolaan rumah susun pada tahun ke-N	angka	angka		0	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	10.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	
			04	02	205	01		Facilitasi Pengelolaan Kebutuhan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah pemilik/penghuni rumah susun yang mendapat fasilitasi pengelolaan kebutuhan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kebutuhan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kebutuhan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun pada tahun ke-N	angka	Laporan	Facilitasi Pengelolaan Kebutuhan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	0	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	10.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	
			04	02	206			Peretriban Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah izin (perubahan site plan) pembangunan perumahan yang dikeluarkan	Jumlah izin pengesahan site plan pembangunan perumahan yang dikeluarkan	Jumlah izin pengesahan site plan pembangunan perumahan pada tahun ke-N	dokumen	dokumen		0	0	0	0	0	1	20.041.966	1	20.177.096	1	20.290.646	1	20.290.646	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	
			04	02	206	03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah dokumen pengendalian pembangunan perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan pada tahun ke-N	dokumen	Laporan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	0	0	0	0	0	1	10.041.966	1	10.177.096	1	10.290.646	1	10.290.646	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	
			04	02	206	04		Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemertahan Daerah dengan Badan Usaha (KPMU) Perubahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi daerah dengan Pemertahan Daerah dengan Badan Usaha (KPMU) Perubahan Umum/Rumah Susun Umum yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemertahan Daerah dengan Badan Usaha (KPMU) Perubahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemertahan Daerah dengan Badan Usaha (KPMU) Perubahan Umum/Rumah Susun Umum pada tahun ke-N	angka	Laporan	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemertahan Daerah dengan Badan Usaha (KPMU) Perubahan Umum/Rumah Susun Umum	0	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	
			04	02	207			Peretriban Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) yang dikeluarkan	Jumlah Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) yang dikeluarkan	Jumlah Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) yang dikeluarkan	dokumen	dokumen		0	0	0	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	1	10.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	
			04	02	207	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Peretriban Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah SKBG yang diterbitkan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peretriban Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peretriban Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) pada tahun ke-N	dokumen	Laporan	Koordinasi dan Sinkronisasi Peretriban Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	0	0	0	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	1	10.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	
			04	03				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persebaran luas kawasan permukiman kumuh di kabupaten yang ditangani	Persebaran luas kawasan permukiman kumuh di kabupaten yang ditangani	Luas permukiman kumuh yang terhadap luas permukiman total x 100	%	%		6,19	16,69	33	18.275.000.000	45	13.866.377.805	56	13.897.572.514	72	13.998.016.905	100	14.082.420.854	100	14.082.420.854	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo
									Persebaran penataan kebijakan rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan pemukiman kumuh sampai dinyatakan sah (gagal)	Persebaran penataan kebijakan rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan pemukiman kumuh sampai dinyatakan sah (gagal)	Sejumlah pekerjaan dokumen yang disusun/jumlah satu dokumen BPKPRP lengkap dan sudah diupload x 100	%	%		0	0	10	50		100	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	
			04	03	201			Peretriban Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Peretriban izin pembangunan kawasan permukiman	Jumlah Peretriban izin pembangunan kawasan permukiman	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun/jumlah satu dokumen BPKPRP lengkap dan sudah diupload x 100	dokumen	dokumen		0	0	0	2	125.000.000	1	50.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Basaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Luas)	Indikator Kinerja Tujuan/Basaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Bani)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan/Basaran/Program/Kegiatan (Output)	Satuan Indikator Kinerja Tujuan/Basaran/Program/Kegiatan (Luas)	Satuan Indikator Kinerja Tujuan/Basaran/Program/Kegiatan (Bani)	Pelebaran	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Revisi Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
			SK	B/P/U	PKK	KBO	SMBK								2020		2021		2022		2023		2024		2025				2026		Target	Rp. (000)
															Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target			Target	Target		
			1	04	03	201	03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh pada tahun ke-N	dokumen	Laporan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh			0		125.000.000	1	50.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo		
			1	04	03	202		Penetapan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah dokumen penetapan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh yang disusun pada tahun N	Jumlah dokumen penetapan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh yang disusun pada tahun N	Jumlah dokumen penetapan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh yang disusun pada tahun ke-N	dokumen	dokumen		1	1	1	1	90.000.000	1	70.876.213	1	76.046.909	1	76.596.536	1	77.058.390	1	77.058.390	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	
			1	04	03	202	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh pada tahun ke-N	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh pada tahun ke-N	dokumen	Dokumen	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			0		-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo			
			1	04	03	202	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penetapan Pemukiman/Perumahan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman kumuh yang dilakukan penetapan/ peremajaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penetapan Pemukiman/Perumahan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penetapan Pemukiman/Perumahan Permukiman Kumuh pada tahun ke-N	Ha	Dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penetapan Pemukiman/Perumahan Permukiman Kumuh			0		-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo			
			1	04	03	202	06	Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah dokumen kebijakan Bidang PKP yang disusun	Jumlah dokumen kebijakan Bidang PKP yang disusun	Jumlah dokumen kebijakan Bidang PKP yang disusun	dokumen	Dokumen	Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP dan Perda Fasum Fasus			1		90.000.000	1	70.876.213	1	26.046.909	1	26.596.536	1	27.058.390	1	27.058.390	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	
			1	04	03	203		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya sampai dengan tahun ke-N	Ha	Ha		11,32	12,32	13,32	18.185.000.000	13,40	13.670.501.592	13,50	13.771.738.975	14	13.881.420.369	14,4	13.965.362.464	14,4	13.965.362.464	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo		
			1	04	03	203	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Perumahan Permukiman Kumuh yang disusun	Jumlah dokumen Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Perumahan Permukiman Kumuh yang disusun	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Perumahan Permukiman Kumuh pada tahun ke-N	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Perumahan Permukiman Kumuh pada tahun ke-N	dokumen	Dokumen	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Perumahan Permukiman Kumuh			1		245.343.400	0	-	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo			
			1	04	03	203	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani sampai dengan tahun ke-N	unit	unit rumah	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			130		18.050.000.000	135	12.330.312.927	140	12.676.680.340	145	12.786.545.158	150	12.469.915.183	700	68.313.453.668	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	
			1	04	03	203	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemukiman/Perumahan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemukiman/ perumahan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemukiman/Perumahan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemukiman/Perumahan Permukiman Kumuh pada tahun ke-N	dokumen	Dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemukiman/Perumahan Permukiman Kumuh			0		135.000.000	1	94.845.265	1	95.058.635	1	94.875.211	1	95.447.281	1	95.447.281	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo	
			1	04	03	203	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemukiman/ Perumahan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen pelaksanaan pembangunan pemukiman/ perumahan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Ditempatkan/Ditugaskan	Luas Permukiman Kumuh yang Ditempatkan/Ditugaskan pada tahun ke-N	Ha	Ha	Pembangunan Pemukiman Kumuh			0		0,02	1.000.000.000	0,02	1.000.000.000	0,02	1.000.000.000	0,02	1.000.000.000	0,02	1.000.000.000				
			1	04	04			PROKORUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Perawatan rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh yang tertangani	Perawatan rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh yang tertangani	Jumlah rumah tidak layak huni yang berada di luar SK kawasan kumuh yang tertangani (jumlah total rumah tidak layak huni yang berada di luar SK kawasan kumuh x 100)	%	%		2,93	3,05	12,72	5.290.000.000	20,20	4.303.318.117	27,48	4.312.347.940	34,56	4.341.423.224	41,44	4.365.855.339	41,44	4.365.855.339	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo		
			1	04	04	201		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani di luar kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani di luar kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah RTM yang tertangani di luar kawasan Permukiman Kumuh (kumulatif)	unit	unit		150	97	41	5.290.000.000	50	4.303.318.117	55	4.312.347.940	60	4.341.423.224	70	4.365.855.339	277	22.612.944.620	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan	Kab. Wonosobo		

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Luas)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Luas)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan (Output)	Satuan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Luas)	Satuan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Baru)	Pelebaran	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
			UR	B/P/U	PRG	KBO	SKB								2020		2021		2022		2023		2024		2025				2026		Target	Rp. (000)
															Target	Target	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)		
			1	04	04	04	04		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terjadinya Penyakit Menular dan Berkebangnya Perumahan Kumuh di Kawasan Perkotaan dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang terdapat dengan luas kawasan Perumahan Kumuh di Kawasan Perkotaan dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terjadinya Penyakit Menular dan Berkebangnya Perumahan Kumuh di Kawasan Perkotaan dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	unit	unit rumah	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terjadinya Penyakit Menular dan Berkebangnya Perumahan Kumuh di Kawasan Perkotaan dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	151	97	42	5.290.000.000	50	4.303.318.117	55	4.312.347.940	60	4.341.423.224	70	4.365.855.339	277	22.612.944.620	Perangkat Daerah Penggumpuan Unsur Perumahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo		
			1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perubahan yang sudah direncanakan PSU (prasana, sarana dan utilitas umum)	Persentase perubahan yang sudah direncanakan PSU (prasana, sarana dan utilitas umum)	Jumlah perubahan yang dibangun pengembangan yang sudah direncanakan PSU/ jumlah perubahan total x 100	%	%		56,67	63,33	73	15.405.000.000	80	12.006.685.367	87	12.032.928.640	93	12.117.429.815	100,00	12.188.436.597	100,00	12.188.436.597	Perangkat Daerah Penggumpuan Unsur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo		
									Persentase satuan permukiman yang memiliki jalan lingkungan dan drainase kondisi baik	Persentase satuan permukiman yang memiliki jalan lingkungan dan drainase kondisi baik	Jumlah satuan permukiman yang memiliki jalan lingkungan dan drainase kondisi baik / jumlah satuan permukiman x 100	%	%		N/A	30	40	50			60	70	80	80	80	80	80	80	Perangkat Daerah Penggumpuan Unsur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo		
			1	04	05	04	04	Usaha Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi yang disediakan PSU	Jumlah lokasi yang disediakan PSU	Jumlah lokasi yang disediakan PSU	lokasi	lokasi		0	56,67	31	15.405.000.000	32	12.001.285.367	33	12.032.928.640	33	12.117.429.815	34	12.188.436.597	34	12.188.436.597	Perangkat Daerah Penggumpuan Unsur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo		
			1	04	05	04	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan pada tahun ke-N	dokumen	dokumen	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	0	0	0	0	0	0	2	500.000.000	0	0	0	0	2	0	Perangkat Daerah Penggumpuan Unsur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo		
			1	04	05	04	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Pungai Hunian	Jumlah PSU kawasan permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Pungai Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Pungai Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Pungai Hunian	lokasi	lokasi	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Pungai Hunian	75	78	80	15.405.000.000	83	12.001.285.367	84	11.532.928.640	85	12.117.429.815	86	12.118.436.597	418	63.175.080.419	Perangkat Daerah Penggumpuan Unsur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo		
			1	04	05	04	05	Verifikasi dan Penyerahan dari Pengembang	Jumlah PSU permukiman yang diverifikasi	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan pada tahun ke-N	angka	Dokumen	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dan Pengembangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	Perangkat Daerah Penggumpuan Unsur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo			
			1	04	05	04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Diganti)	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Diganti)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan pada tahun ke-N	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan pada tahun ke-N	angka	Laporan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	40.000.000	1	40.000.000	Perangkat Daerah Penggumpuan Unsur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo			
								Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan (lama)																								
			1	04	06			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN	Persentase perubahan yang bersertifikasi	Persentase perubahan yang bersertifikasi	Jumlah perubahan yang bersertifikasi/jumlah pengembangan kualifikasi kecil x 100	%	%		N/A	10,00	15,00	20,00	25.000.000	25,00	25.052.458	50,00	25.221.371	100,00	25.363.309	100,00	25.363.309	Perangkat Daerah Penggumpuan Unsur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo			
			1	04	06	04	04	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perencanaan dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah Pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan dan perencanan rumah serta perencanan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Jumlah Pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan dan perencanan rumah serta perencanan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Jumlah Pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan dan perencanan rumah serta perencanan prasarana, sarana, dan utilitas umum	kegiatan	kegiatan		0	0	0	1	25.000.000	1	25.052.458	1	25.221.371	1	25.363.309	1	25.363.309	Perangkat Daerah Penggumpuan Unsur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo			
			1	04	06	04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah sertifikasi dan registrasi pengembangan perumahan yang disertifikasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	dokumen	Dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	0	0	0	1	25.000.000	1	25.052.458	1	25.221.371	1	25.363.309	1	25.363.309	Perangkat Daerah Penggumpuan Unsur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Wonosobo			

URBAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN NON PELAYANAN DASAR
URBAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (lama)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (baru)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (lama)	Satuan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (baru)	Pekerjaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi															
			SK	R/PU	PRG	KBO	SKSK								2020		2021		2022		2023		2024		2025				2026		Target	Rp. (000)											
															Target	Target	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)											
2	devejujian pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Penatagunaan tanah yang optimal													63,34	64,5	66				66			69			71			72			72,47		Perangkat Daerah Pengampu Utusan Penunjang Utusan PPKNIMHUB	Kab. Wonosobo							
															100,00	100	100				100			100			100			100			100,00		Perangkat Daerah Pengampu Utusan Pemertintahan Bidang Pertanahan	Kab. Wonosobo							
			2	10	04										0,00	100,00	100				100			24.404.451	100		24.455.655	100		24.620.548	100		24.759.104	100,00	24.759.104	Perangkat Daerah Pengampu Utusan Pemertintahan Bidang Pertanahan	Kab. Wonosobo						
			2	10	04	201									0,00	4,00	4				4			24.404.451	4		24.455.655	4		26.620.548	4		26.759.104	4,00	26.759.104	Perangkat Daerah Pengampu Utusan Pemertintahan Bidang Pertanahan	Kab. Wonosobo						
			2	10	04	201	01								0,00	0,00	0				1			12.000.000	1		12.000.000	1		12.000.000	1		12.000.000	1,00	12.000.000	Investoriasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Kab. Wonosobo						
			2	10	04	201	02								30.000.000						1			12.404.451	1		12.455.655	1		14.620.548	1		14.759.104	1,00	14.759.104	Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Wonosobo						
			2	10	10										100,00	100,00	0				100			100.000.000	100		100.209.884	100		100.885.482	100		101.453.232	100,00	101.453.232	Perangkat Daerah Pengampu Utusan Pemertintahan Bidang Pertanahan	Kab. Wonosobo						
			2	10	10	201									N/A	N/A	0				2			100.000.000	2		100.209.884	2		100.885.482	2		101.453.232	2,00	101.453.232	Penggunaan Tanah yang Hampirannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Wonosobo						
			2	10	10	201	02								0,00	3,00	0				2			100.000.000	1		100.209.884	1		100.885.482	1		101.453.232	5,00	101.453.232	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Wonosobo						
URBAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																																											
3	Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas														61,61	64,28	66,81				69,43			72,00			73,72			75,15			75,15		Perangkat Daerah Pengampu Utusan Pemertintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo							

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan (Lama)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan (Baru)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan (Output)	Satuan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan (Lama)	Satuan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan (Baru)	Pembelangan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
			UR	R/PU	PRG	KBO	SKSK								2020		2021		2022		2023		2024		2025				2026		Target	Rp. (000)
															Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target			Target	Target		
		Meningkatnya indeks keselamatan lalu lintas						Indeks keselamatan lalu lintas	Indeks keselamatan lalu lintas	Indeks komposit mengikuti keselamatan lalu lintas jalan kabupaten dengan menghitung persentase fasilitas perkeropongan jalan + layanan angkutan darat + sarana transportasi + titik keselamatan + manajemen + rekayasa lalu lintas + layanan uji berkala + kendaraan / 7	%	%		61,61	64,28	66,81	69,43		72,00		73,72		75,15			75,15		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo			
			3	13	02		PROKRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUKAN JALAN (LALAS)	Persentase ruas jalan kabupaten yang dilengkapi dengan fasilitas perkeropongan jalan	Persentase ruas jalan kabupaten yang dilengkapi dengan fasilitas perkeropongan jalan	Jumlah ruas jalan kabupaten yang dipasang fasilitas perkeropongan jalan marka, RPP, marka, guard rail, LRTU, APRL, delineator, cermin tikung, ATCN/ jumlah ruas jalan kabupaten	%	%		47,1	48,84	52	6.095.900.000	53,33	4.958.903.007	55,58	4.969.308.470	57,83	5.002.813.201	60,07	5.030.967.403	60,07	5.030.967.403	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo			
								Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Jumlah pemangangan perkeropongan jalan kabupaten/jumlah kebutuhan perkeropongan jalan x 100	%	%		89,91	90,26	90,60	91,28		91,62		91,97		92,31		92,31	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo					
								Persentase terminal tipe C kondisi baik dan berfungsi optimal	Persentase terminal tipe C kondisi baik dan berfungsi optimal	Jumlah terminal tipe C kondisi baik dan optimal/jumlah terminal tipe C x 100	%	%		37,50	43,75	45,30	50,25		55,50		58,75		75,00		75,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo					
								Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan uji berkala kendaraan bermotor	Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan uji berkala kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan yang melakukan uji kir berkala /jumlah kendaraan wajib uji kir x 100	%	%		74,7	75,62	78	82		87		90		100		100							
								Persentase parkir tepi jalan umum yang tertata	Persentase parkir tepi jalan umum yang tertata	Jumlah titik parkir tepi jalan umum yang tertata dan atau memiliki kantong parkir/ jumlah titik parkir tepi x 100	%	%		11,43	14,29	17,14	20,00		25,71		28,57		42,86		42,86		42,86	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo			
								Persentase tersedianya fasilitas parkir sistem elektronik	Persentase tersedianya fasilitas parkir sistem elektronik	Jumlah fasilitas parkir yang menerapkan sistem elektronik/jumlah fasilitas parkir tersedia x 100	%	%		0,00	0,00	0	3		6		9		9		9		9	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo			
								Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi	Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi	Jumlah layanan angkutan darat yang layak fungsi/ jumlah layanan angkutan darat yang tersedia x 100	%	%		46,94	50,00	50	50		50		50		50		50		50	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo			
								Persentase sarana transportasi yang memenuhi standar keselamatan	Persentase sarana transportasi yang memenuhi standar keselamatan	total sarana transportasi yang memenuhi standar keselamatan/total kendaraan yang beroperasi di tahun N x 100	%	%		42,27	50,00	55	60		65		67		68		68		68	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo			
								Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C yang tersedia / jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan	%	%		57,14	57,62	58	59		59		59		60		60		60	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo			
								Persentase pelaksanaan pelayanan uji berkala	Persentase pelaksanaan pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun / jumlah kendaraan wajib uji x100	%	%		57,14	57,62	58,09	58,53		58,96		59,39		59,82		59,82		59,82	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo			

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan (Lama)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan (Baru)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan (Output)	Satuan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan (Lama)	Satuan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan (Baru)	Pekerjaan	BASE LINE										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
			01	02	03	04	05								2020		2021		2022		2023		2024		2025				2026		Target	Rp. (000)
															Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target			Target	Target		
								V/C Baso pada jalan kabupaten	V/C Baso pada jalan kabupaten	Perbaikan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan	angka	angka		0,80	0,75	0,70	0,60				0,50			0,40			0,30	0,30	10.000,000	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo	
			2	15	02	201		Penerapan Rencana Induk Jaringan LAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana induk jaringan LAJ Kabupaten/Kota	dokumen	dokumen		0	0	3	10.000,000	0		1	10.000,000	1	10.000,000	1	10.000,000	1	10.000,000	1	10.000,000	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo	
			2	15	02	201	02	Penerapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen dan sosialisasi RILAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LAJ Kabupaten/Kota pada tahun ke-N	dokumen	Dokumen	Pembuatan Perencanaan turunan dari RILAJ	0	0	3	10.000,000	0		1	10.000,000	1	10.000,000	1	10.000,000	1	10.000,000	1	10.000,000	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo	
			2	15	02	202		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah ruas jalan kabupaten yang terpasang fasilitas perengkapan jalan	Jumlah ruas jalan kabupaten yang terpasang fasilitas perengkapan jalan	ruas	ruas		20	21	22	4.310.000,000	23	2.821.251.826		24	2.856.473.650	25	2.858.974.185	26	2.874.220.235	167	2.874.220.235	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo		
			2	15	02	202	02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah ruas jalan yang dilengkapi perengkapan jalan	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	ruas	unit	Pengadaan dan pemasangan perengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang Terjadi	184	196	205	3.635.000,000	208	2.276.765.183	210	2.346.518.527	212	2.347.068.492	215	2.347.530.346	1.050	12.952.882.548	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo			
			2	15	02	202	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah ruas jalan yang direhabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terpelihara dan Terpelihara	ruas	unit	pereliharaan APJ -pemeliharaan APJ -pemeliharaan rambu -pengadaan rambu -pengadaan material jaringan instalasi APJ -pengadaan erem tikang -pengadaan trotoir cone -pengadaan lampu LED	100		100	675.000,000	80	544.486.643	75	509.955.123	75	511.905.693	75	526.689.889	75	526.689.889	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo			
			4	15	03	203		Pengelolaan Terminal Pemumpang Tipe C	Jumlah terminal tipe C yang dikelola	Jumlah terminal tipe c yang dikelola	lokasi	lokasi		2	2	2	120.900,000	3	347.000,000	3	310.000,000	3	314.000,000	3	321.000,000	3	321.000,000	Perangkat Daerah Pengampu Unsur	Kab. Wonosobo			
			2	15	02	203	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah terminal tipe C yang dikembangkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	lokasi	Unit	Pembuatan Pos Swangon -Pengembangan Fasilitas Umum di Terminal Swangon -Pengembangan Terminal Wadailintang	1	0	1	23.900,000	2	340.000,000	2	235.000,000	2	234.000,000	2	240.000,000	2	240.000,000	240.000,000	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo		
			2	15	02	203	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Fasilitas Utama dan Pendukung	Jumlah Terminal Tipe C yang direhabilitasi dan pemeliharaan	Jumlah Terminal Fasilitas Utama dan Pendukung yang Direhabilitasi dan Dipelihara	lokasi	Unit	Rehabilitasi Terminal Swangon, Mendolo	1	1	2	97.000,000	2	107.000,000	2	75.000,000	2	80.000,000	2	81.000,000	2	81.000,000	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo			
			2	15	02	204		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang dikeluarkan	Jumlah izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang dikeluarkan	lokasi	lokasi		30	35	36	110.000,000	37	89.482.985	38	89.670.751	39	90.275.341	40	90.783.381	42,86	90.783.381	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo			

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan (Luas)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan (Baru)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan (Output)	Satuan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan (Luas)	Satuan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan (Baru)	Pelebaran	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi						
			UR	R/P/U	PRG	KDB	SUBK								2020		2021		2022		2023		2024		2025				2026		Target	Rp. (000)		
															Target	Target	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
			2	15	02	204	04	01	<p>Penyediaan Fasilitas Pemenuhan Peryaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</p>	<p>Jumlah Izin Penyelenggaraan Parkir yang dikeluarkan</p>	<p>Jumlah Dokumen Pemenuhan Peryaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</p>	<p>Jumlah Dokumen Pemenuhan Peryaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik pada tahun ke-N</p>	<p>Dokumen</p>	<p>Laporan</p>	<p>Penerapan Perizinan Elektronik di Basemen BKA-RITA</p>			0										0	40.000.000	0			Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo
			2	15	02	204	02		<p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah pelaksanaan pengurusan izin penyelenggaraan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun ke-N</p>	<p>Dokumen</p>	<p>Laporan</p>	<p>Penerapan Parkir berlangganan di titik strategis Kab. Wonosobo</p>			1		110.000.000	1	89.482.985	1	89.670.751	1	50.275.341	1	90.783.381	1	90.783.381	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo		
			2	15	02	205			<p>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</p>	<p>Jumlah kendaraan wajib uji yang melaksanakan uji berkala</p>	<p>Jumlah kendaraan wajib uji berkala</p>	<p>Jumlah kendaraan wajib uji yang melaksanakan uji berkala</p>	<p>unit</p>	<p>unit</p>			8000	8500	9000	225.000.000	9100	483.033.379	9200	483.417.445	9300	494.654.107	9400	485.693.280	9400	485.693.280	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo		
			2	15	02	205	01		<p>Persediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</p>	<p>Jumlah sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</p>	<p>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia</p>	<p>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia sampai tahun ke-N</p>	<p>angka</p>	<p>unit</p>	<p>pengadaan alat uji 9 Unit + genset, mesin antrian, edisi gedung uji, Rak Kartu Induk, Lahan Parkir</p>			0	0	0		3	320.000.000	3	310.000.000	3	310.000.000	3	310.000.000	12	1.250.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo	
			2	15	02	205	04		<p>Persediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</p>	<p>Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan</p>	<p>Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</p>	<p>Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada tahun ke-N</p>	<p>angka</p>	<p>Dokumen</p>	<p>Pembelian bukti uji (BU-U) dengan dilengkapi RFID (Radio Frequency Identification)</p>			1000		25.000.000	5000	20.337.042	5100	20.379.716	5200	20.517.123	5300	20.632.587	5300	20.632.587	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo		
			2	15	02	205	07		<p>Penelitian Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</p>	<p>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara</p>	<p>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara</p>	<p>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara pada tahun ke-N</p>	<p>angka</p>	<p>Unit</p>	<p>Penelitian alat uji gedung administrasi dan gedung uji</p>			12		200.000.000	12	142.696.337	12	153.037.729	12	164.136.984	12	155.060.693	12	155.060.693	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo		
			2	15	03	206			<p>Pelaksanaan Manajemen dan Rekrutasi Lahu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah pelaksanaan manajemen dan rekrutasi lahu lintas Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah pelaksanaan manajemen dan rekrutasi lahu lintas</p>	<p>Jumlah pelaksanaan manajemen dan rekrutasi lahu lintas</p>	<p>angka</p>	<p>angka</p>			250	252		860.000.000	254	760.000.000	256	691.594.738	258	736.702.719	260	751.017.472	260	751.017.472	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo		
			2	15	02	206	01		<p>Penataan Manajemen dan Rekrutasi Lahu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah dokumen Manajemen dan Rekrutasi Lahu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekrutasi Lahu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekrutasi Lahu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota pada tahun ke-N</p>	<p>dokumen</p>	<p>Laporan</p>	<p>Penghitungan Rasio Jalan di Jalan Strategis</p>			12		460.000.000	12	460.000.000	12	440.965.236	12	434.073.217	12	446.684.870	12	446.684.870	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo		
			2	15	02	206	05		<p>Forum Lahu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah dokumen Forum Lahu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Laporan Forum Lahu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Laporan Forum Lahu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota pada tahun ke-N</p>	<p>dokumen</p>	<p>Laporan</p>	<p>Rapat Rutin dan Triwulan</p>			12	12	400.000.000	12	300.000.000	12	250.629.502	12	302.629.502	12	304.332.602	12	304.332.602	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo		
			2	15	02	207			<p>Penetapan Hasil Analisis Dampak Lahu Lintas (Maddalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah dokumen analisis yang disetujui</p>	<p>Jumlah dokumen analisis yang disetujui</p>	<p>Jumlah dokumen analisis yang disetujui</p>	<p>dokumen</p>	<p>dokumen</p>			25	40	100	10.000.000	110	8.134.817	115	28.151.886	120	28.206.849	125	28.253.035	125	28.253.035	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo		
			2	15	02	207	02		<p>Peningkatan Kapasitas Penilai Andalan</p>	<p>Jumlah personel yang melaksanakan dilatih penilai Andalan</p>	<p>Jumlah Penilai Andalan yang dipingarkan Kapasitasnya</p>	<p>Jumlah personel yang melaksanakan dilatih penilai Andalan pada tahun ke-N</p>	<p>angka</p>	<p>orang</p>	<p>Diklat andalan</p>			0	1	0		0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo		
			2	15	02	207	03		<p>Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalan</p>	<p>Jumlah dokumen yang diteliti</p>	<p>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalan</p>	<p>Jumlah dokumen yang diteliti pada tahun ke-N</p>	<p>angka</p>	<p>Laporan</p>	<p>Survey Penilai Andalan</p>			0	0	100		110	4.000.000	115	10.000.000	120	10.000.000	125	10.000.000	125	10.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo	
			2	15	03	207	04		<p>Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalan</p>	<p>Jumlah rekomendasi yang dilakukan pengawasan</p>	<p>Jumlah Laporan Rekomendasi Andalan yang Terawasi</p>	<p>Jumlah rekomendasi andalan yang dilakukan pengawasan pada tahun ke-N</p>	<p>angka</p>	<p>Laporan</p>	<p>Pengawasan dan monitoring hasil penilaian andalan</p>			0	0	100	10.000.000	110	4.134.817	115	8.151.886	120	8.206.849	125	8.253.035	125	8.253.035	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo	

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan (Lama)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan (Baru)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan (Output)	Sasaran Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan (Baru)	Sasaran Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan (Baru)	Pelebaran	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
			UR	B/P/U	PRG	KBO	SKSK	2020								2021		2022		2023		2024		2025		2026				Target	Rp. (000)		
								Target								Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target					Target	Target
			2	15	02	208			Audit dan Inspeksi Keselamatan LIA di Jalan	Jumlah Rias Jalan yang di Audit atau di Inspeksi	Jumlah Rias Jalan yang di Inspeksi atau di Audit	Jumlah Rias Jalan yang di Audit (kumulatif)	%	ruas		1	1	2	225.000.000	3	225.000.000	4	225.000.000	5	225.000.000	6	225.000.000	6	225.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo		
			2	15	02	208	03		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah DKK yang ditangani	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal pada tahun ke-N	Laporan	Laporan	socialisasi dan pencetakan brosur/program ke-NDL	0	0	12	225.000.000	12	245.000.000	12	225.000.000	12	225.000.000	12	225.000.000	12	225.000.000	12	225.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo
			2	15	02	209			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ruas jalan yang dilalui trayek angkutan umum	Jumlah ruas jalan yang dilalui trayek angkutan umum	Jumlah ruas jalan yang dilalui trayek angkutan umum	ruas	ruas		36	36	0	0	0	12	50.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	41,00	20.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo	
			2	15	02	209	01		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Trayek Angkutan Umum yang disediakan	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia pada tahun ke-N	unit	Unit	Promosi dan Perbaikan WonoSolo	0	0	0	0	0	20	50.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo	
		Meningkatnya konektivitas wilayah							Rasio konektivitas wilayah	Rasio konektivitas wilayah	IK1 x bobot angkutan jalan + IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan, dengan IK berupa kinerja jumlah trayek terlayani	angka	angka		92,5	93	93,50	94,50			99,00		96,50		97,00		97,00		97,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo		
			2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYANAN	Persewaan dermaga penyeberangan waduk dalam kondisi baik	Persewaan dermaga penyeberangan waduk dalam kondisi baik	Jumlah dermaga kondisi baik/jumlah dermaga total x 100	%	%		0,00	0,00	0,00	20.000.000	25,00	20.000.000	30,00	20.041.967	35,00	20.177.096	50,00	20.290.647	50,00	20.290.647	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo			
			2	15	3	2.03			Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Jumlah Ijin usaha yang diterbitkan	Jumlah Ijin usaha yang diterbitkan	Jumlah Ijin usaha yang diterbitkan	angka	angka		0	0	0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo	
			2	15	3	2.03	2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Ijin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Ijin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun ke-N	Laporan	Laporan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha	0	0	0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo
			2	15	3	2.04			Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ijin yang dikeluarkan	Jumlah Ijin yang dikeluarkan	Jumlah Ijin yang dikeluarkan	angka	angka		0	21	20	20.000.000	0	0	20	10.041.967	20	5.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo		
			2	15	3	2.04	1		Facilitasi Pemenuhan Perizinan Perolehan Ijin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Ijin pelabuhan sungai dan danau yang dikeluarkan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Perizinan Perolehan Ijin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Perizinan Perolehan Ijin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik pada tahun ke-N	angka	Dokumen	Ijin perubahan sungai dan danau yang dikeluarkan	0	31	20	20.000.000	0	0	20	10.041.967	20	5.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo		
			2	15	3	2.13			Pembangunan dan Penerbitan Ijin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah dermaga dalam kondisi baik	Jumlah dermaga dalam kondisi baik	Jumlah dermaga dalam kondisi baik	lokasi	lokasi		0,00	0,00	0,00	0	0	1	10.000.000	1	15.177.096	1	10.290.647	1	10.290.647	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo			

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Basaran/Program/Kegiatan (Luas)	Indikator Kinerja Tujuan/Basaran/Program/Kegiatan (Rend)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan/Basaran/Program/Kegiatan (Output)	Satuan Indikator Kinerja Tujuan/Basaran/Program/Kegiatan (Luas)	Satuan Indikator Kinerja Tujuan/Basaran/Program/Kegiatan (Rend)	Pelebaran	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
			UR	R/PU	PRG	KBO	SKSK								2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				Target	Rp. (000)		
																	Target	Target	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					Target	Rp. (000)
			2	15	3	2.1.3	1	fasilitas Pemenuhan Peryaratan Perencanaan dan Pengoperasian Pelabahan Sungai dan Danau	Jumlah tam pengoperasian dan pengoperasian pelabahan sungai dan danau yang dikliruarkan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Peryaratan Perencanaan Pelabahan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan pada tahun ke-N	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelabahan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara pada tahun ke-N	angka	Dokumen	Jam	Pembangunan dan pengoperasian pelabahan sungai dan danau yang dikluruarkan	0,00	0,00	0,00	0	0	2	5.000.000	2	10.000.000	2	5.290.647	2	5.290.647	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo		
			2	15	3	2.1.3	2	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabahan Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga yang diproseskan dan direhabilitasi	Jumlah Pelabahan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Jumlah Pelabahan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara pada tahun ke-N	lokasi	Unit	Dermaga yang diproseskan dan direhabilitasi	0,00	0,00	0,00	0	0	2	5.000.000	2	5.177.096	2	5.000.000	2	5.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kab. Wonosobo			
5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik								Nilai ketercapaian SPM layanan dasar	Nilai ketercapaian SPM layanan dasar	Jumlah nilai ketercapaian SPM layanan dasar /jumlah usulan layanan dasar x 100	%	%		90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Unsur PERKIMHUB	Kab. Wonosobo		
									Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor hasil survei pelayanan publik, Indeks ini menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diantengarkan oleh pemberi pelayanan publik	%	%		81,81	82	83	83	83	84	84	85	85	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Unsur PERKIMHUB	Kab. Wonosobo	
	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel								Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Rata-rata nilai komposit dari 3 komponen yaitu 1) perencanaan kinerja, 2) Pengukuran kinerja, 3) Pelaporan	angka	angka		63,34	64,5	65,76	5824447160,00	66,42	7177009733,57	*****	705252271,70	70,64	7329546070,61	72,47	742249277,96	72,47	7.422.429.278	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Unsur PERKIMHUB	Kab. Wonosobo		
									Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor Rata-rata hasil survey	%	%		81,81	82	82,50	83,00	83,00	83,50	84,00	84,50	85	84,50	84,50	84,50	84,50	84,50	84,50	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Unsur PERKIMHUB	Kab. Wonosobo	
			4	xx	ii	iii		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Aset Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik	Persentase Aset Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik	Jumlah Aset Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik / Jumlah Aset Perangkat Daerah X 100	%	%		100	100	100	5.824.447.160	100	7.177.009.734	100	7.074.863.093	100	7.329.546.071	100	7.442.429.278	100	7.422.429.278	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Unsur PERKIMHUB	Kab. Wonosobo		
									Persentase Pemenuhan Surplus Pendukung Kinerja	Persentase Pemenuhan Surplus Pendukung Kinerja	Jumlah Surplus Pendukung Kinerja yang terpenuhi / Jumlah Kebutuhan Surplus Pendukung Kinerja X 100	%	%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Unsur PERKIMHUB	Kab. Wonosobo	
									Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran / Jumlah Pelayanan Perkantoran X 100	%	%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Unsur PERKIMHUB	Kab. Wonosobo	
									Persentase keselarasan program renja perangkat daerah dengan RRPD	Persentase keselarasan program renja perangkat daerah dengan RRPD	Jumlah Program Renja PD yang selaras dengan program RRPD / Jumlah Program RRPD senilai urusan X 100	%	%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Unsur PERKIMHUB	Kab. Wonosobo
			4	xx	ii	iii		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan nama OPD yang disusun tepat waktu / jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan nama OPD yang seharusnya disusun 100%	%	%		100	100	100	30.000.000	100	30.000.000	100	35.640.760	100	35.670.980	100	35.000.960	100	35.000.960	100	35.000.960	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Unsur PERKIMHUB	Kab. Wonosobo
			4	xx	ii	iii	iii	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada tahun ke-N	Dokumen	Dokumen	Renja, Renstra, P, LKJP atau Komponen SAKIP	4	4	4	30.000.000	4	30.000.000	4	35.640.760	4	35.670.980	4	35.000.960	4	35.000.960	4	35.000.960	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Unsur PERKIMHUB	Kab. Wonosobo
			4	xx	ii	iii	iii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu / jumlah administrasi keuangan yang harus dilaporkan 100%	Dokumen	Dokumen	Laporan Keu. Semesteran	2	2	2	4.413.504.800	2	5.142.352.035	2	5.124.115.355	2	5.138.150.730	2	5.159.389.750	2	5.159.389.750	2	5.159.389.750	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Unsur PERKIMHUB	Kab. Wonosobo
												Dokumen	Dokumen	Lap Keu. Audited)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Unsur PERKIMHUB	Kab. Wonosobo	
												Dokumen	Dokumen	Lap Keu. Bulanan)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Unsur PERKIMHUB	Kab. Wonosobo

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Basaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Luas)	Indikator Kinerja Tujuan/Basaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Rasio)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Luas)	Satuan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Rasio)	Pelebaran	BASE LINE										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
			UR	R/PU	PRG	KBO	SKSK	2020								2021		2022		2023		2024		2025		2026				Target	Rp. (000)	
								Target								Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target					Target
			x	xx	01	002	001	1	Penyediaan Uji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan uji dan tunjangan ASN	Cakupan Layanan uji dan tunjangan ASN	Cakupan Layanan uji dan tunjangan ASN pada tahun ke-N	orang / tahun	orang / tahun	penyusunan uji dan tunjangan ASN	43 x 14 bulan	44 x 14 bulan	45 x 14 bulan	4.413.504.800	43 x 14 bulan	5.142.352.035	43 x 14 bulan	5.124.115.555	43 x 14 bulan	5.138.150.730	43 x 14 bulan	5.159.389.750	43 x 14 bulan	5.159.389.750	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan PERKUMHUB	Kab. Wonosobo	
			x	xx	01	005		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Umfah pelayanan administrasi kepegawaian yang responsif/ jumlah pelayanan kepegawaian x 100	%	%		100	100	0	100	91.101.310	100	22.340.321	100	102.321.223	100	102.321.223	0	20.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan PERKUMHUB	Kab. Wonosobo			
			x	xx	01	005	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	alat	unit	sarana prasarana penunjang disiplin pegawai	100	100	0	100	20.550.760	100	22.340.321	100	100	100	0	20.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan PERKUMHUB	Kab. Wonosobo				
			x	xx	01	005	02	Pengadaan Pakuan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Pengadaan Pakuan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakuan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakuan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	set pakaian dinas	paket	Alat & pakaian dinas	0	0	0	0	70.550.550	0	0	0	0	45 x 1 set pakaian dinas	102.321.223	0	0	0	0	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan PERKUMHUB	Kab. Wonosobo	
			x	xx	01	006		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	Jumlah realisasi belanja administrasi umum/ jumlah anggaran belanja administrasi umum x 100%	%	%		100	100	100	37.871.360	100	516.311.919	100	498.140.187	100	537.123.007	100	643.373.847	100	643.373.847	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan PERKUMHUB	Kab. Wonosobo		
			x	xx	01	006	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun ke-N	titik	paket	Pembelian label alat instalasi listrik	2	2	2	85.000.000	2	100.000.000	2	120.320.231	2	125.330.430	2	130.280.907	2	130.280.907	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan PERKUMHUB	Kab. Wonosobo		
			x	xx	01	006	02	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Layanan Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun ke-N	Jenis	paket	penambahan jaringan WIFI, Listrik	80	80	80	85.500.860	83	100.000.000	82	98.765.434	90	115.468.907	100	150.890.754	100	150.890.754	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan PERKUMHUB	Kab. Wonosobo		
			x	xx	01	006	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun ke-N	Jenis (skorasi)	paket	Dekorasi, dll	20	20	20	20.000.000	25	48.887.330	25	45.683.552	30	25.222.780	40	35.467.875	40	35.467.875	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan PERKUMHUB	Kab. Wonosobo		
			x	xx	01	006	06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Layanan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun ke-N	Jenis (UTK Kantor)	paket	Pembelian ATK	100	100	100	44.778.500	100	51.323.456	100	50.980.765	100	52.342.132	100	55.432.341	100	55.432.341	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan PERKUMHUB	Kab. Wonosobo		
			x	xx	01	006	08	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan pada tahun ke-N	Eksemplar	Dokumen	Pembayaran komor kelengkapan	2 x 12	2 x 12	2 x 12	2.700.000	2 x 12	3.576.090	2 x 12	3.098.786	2 x 12	2.890.765	2 x 12	3.560.908	2 x 12	3.560.908	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan PERKUMHUB	Kab. Wonosobo		
			x	xx	01	006	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun ke-N	Paket	Laporan	Penyetenggaraan a rapat	100	100	100	135.892.000	100	212.525.043	100	179.291.419	100	215.867.993	100	267.741.062	100	267.741.062	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan PERKUMHUB	Kab. Wonosobo		
			x	xx	01	007		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang yang terrealisasi/ jumlah Rencana Pengadaan Barang X 100	bilan	bilan		12	12	12	75.000.000	12	231.574.445	12	89.218.969	12	241.442.866	12	150.980.790	12	150.980.790	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan PERKUMHUB	Kab. Wonosobo		
			x	xx	01	007	01	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun ke-N	unit	unit	pengadaan mebel	100	100	100	100	50.350.450	100	50.350.450	100	50.987.990	100	50.987.990	100	50.987.990	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan Penunjang Urusan	Kab. Wonosobo			
			x	xx	01	007	06	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun ke-N	unit	unit	Pengadaan perlatan dan mesin penunjang urusan kantor	-	-	10	75.000.000	15	111.223.995	10	89.218.969	11	90.454.876	11	90.980.790	100	90.980.790	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan PERKUMHUB	Kab. Wonosobo		
			x	xx	01	007	08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun ke-N	Unit bangunan	unit	Pembangunan gedung kantor	-	-	-	70.000.000	1	70.000.000	-	-	1	100.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan PERKUMHUB	Kab. Wonosobo		
			x	xx	01	008		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				%			100	100	100	615.500.000	100	714.071.725	100	734.655.842	100	768.610.745	100	774.208.242	100	774.208.242	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan PERKUMHUB	Kab. Wonosobo		

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Luas)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Buru)	Rumusan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program (Output), Kegiatan (Output)	Sasaran Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan /Sub Kegiatan (Luas)	Sasaran Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan /Sub Kegiatan (Buru)	Pekerjaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
			RS	R/PU	PRG	KBO	SBBK	2020								2021		2022		2023		2024		2025		2026				Target	Rp. (000)	
								Target								Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target					Target
			x	xx	01	200	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada tahun ke-N	Materi & paket pengiriman	Laporan	Pembelian materi dan paket pengiriman	225	225	225	2.500.000	225	2.750.000	225	3.209.804	225	3.908.765	225	4.245.309	225	4.245.309	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Utama PPKMIMHUB	Kab. Wonosobo	
			x	xx	01	200	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun ke-N	Unit / tahun	Laporan	Pembayaran retribusi PDAM, Listrik, WPT, dll	4	4	4	64.000.000	4	65.500.750	4	67.890.799	4	70.908.760	4	69.054.033	4	69.054.033	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Utama PPKMIMHUB	Kab. Wonosobo	
			x	xx	01	200	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun ke-N	Orang / bulan	Laporan	Penyediaan jasa penunjang urusan kantor	23	25	25	549.000.000	25	645.820.975	25	683.555.239	25	693.793.220	25	700.908.900	25	700.908.900	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Utama PPKMIMHUB	Kab. Wonosobo	
			x	xx	01	200			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Jumlah anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah X 100	%	%		100	100	100	316.571.000	100	451.598.300	100	550.751.459	100	506.226.520	100	659.475.689	100	659.475.689	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Utama PPKMIMHUB	Kab. Wonosobo	
			x	xx	01	200	03		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun ke-N	Unit kendaraan Mobil	unit	Pembayaran pajak kendaraan dinas	10	10	32	236.571.000	10	250.456.780	10	270.897.890	10	280.908.765	10	302.456.789	10	302.456.789	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Utama PPKMIMHUB	Kab. Wonosobo	
													Unit kendaraan Truk			1	1					1				1						
													Unit kendaraan Motor			21	21					21				21						
			x	xx	01	200	05		Pemeliharaan Mebel	Cakupan Layanan Penyediaan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun ke-N	unit	unit	perawatan mebel	25	25	25	5.000.000	25	15.340.980	25	13.231.890	25	13.908.765	25	20.321.455	25	20.321.455	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Utama PPKMIMHUB	Kab. Wonosobo	
			x	xx	01	200	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun ke-N	Unit	unit	Perawatan mesin dan peralatan penunjang kantor	25	25	25	25.000.000	25	35.249.870	25	40.980.789	25	30.421.340	25	33.241.555	25	33.241.555	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Utama PPKMIMHUB	Kab. Wonosobo	
			x	xx	01	200	07		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun ke-N	Unit gedung	unit	Rehabilitasi gedung kantor	2	2	2	50.000.000	2	150.550.670	2	225.640.890	2	180.987.650	2	303.455.890	2	303.455.890	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Utama PPKMIMHUB	Kab. Wonosobo	